



Wahana Visi
INDONESIA



Peta Jalan Model Pendanaan dan Penganggaran Air Minum dan Sanitasi di Komunitas, Sekolah dan Sarana Kesehatan

Pokja PKP Kabupaten Ende

Kata Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya yang telah diberikan sehingga kita dapat menyusun Road Map model pendanaan dan penganggaran untuk program air minum, sanitasi dan hygiene secara baik. Berangkat dari kesadaran kritis kita selama ini bahwa perencanaan WASH yang selama ini kita lakukan masih terpisah-pisah sehingga kesulitan dalam memantau perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada komunitas atau masyarakat, layanan kesehatan serta sarana pendidikan.


Kami ucapkan limpah terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang telah membantu pemerintah selama ini terutama mendorong kerjasama terkait pengembangan masyarakat terutama air minum dan sanitasi termasuk dalam menyusun Road Map ini.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mendukung perencanaan dan penganggaran pada 3 (tiga) setting target yakni Komunitas, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, sebagai pendukung alternatif pendanaan dari sumber lain seperti Perbankan, Koperasi kredit maupun CSR, Selain itu adanya informasi gap anggaran sebagai data perencanaan bagi pemerintah

Harapannya, kedepan dokumen ini menjadi pegangan semua pihak dalam merencanakan program air minum, sanitasi dan hygiene dalam dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah. Kami juga berharap bahwa dokument ini juga menjadi dokumen rujukan untuk teman-teman NGO atau LSM dan pihak swasta lainnya dalam membantu pemerintah untuk tujuan pencapaian Universal Coverage di kabupaten.

Semoga semua pihak dapat terus berkolaborasi dalam mewujudkan kebersamaan agar tujuan Kabupaten Ende dalam mencapai 100% akses air minum dan sanitasi dapat dicapai dimana semua orang mendapat akses air minum dan sanitasi yang layak bagi semua orang.

Ende, Oktober 2023



Andreas Worho, ST.MT
Kepala Bappeda Ende

Daftar Isi

Sampul	01
Kata Pengantar	02
Daftar Isi	03
Daftar Singkatan	04
Pendahuluan	05
Tujuan	07
Gambaran Umum Sistulasi Air Minum di Indonesia	08
Gambaran Umum Kabupaten Ende	09
Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Ende	23
Standar Kriteria Perencanaan Air Minum	35
Gambaran Umum Kondisi Air Minum dan Sanitasi Komunitas di Kabupaten Ende	38
Indikator Air, Sanitasi dan Hygiene di Sekolah	46
Penting nya sarana Air, Sanitasi dan Hygiene di Sarana Kesehatan	48
Analisis Kebutuhan Investasi Air dan Sanitasi pada Komunitas	51
Perhitungan Gap Kebutuhan Anggaran Air dan Sanitasi Berdasarkan RAD AMPL	52
Alur dan Struktur Perencanaan dan Anggaran Pemerintah di Kabupaten Ende	53
Skenario Pencapaian Sasaran Sanitasi	59
Kondisi SPAM Eksisting di Kabupaten Ende	60
Budget Eksisting Air dan Sanitasi Pada 3 Setting Target	61
Estimasi Kebutuhan, Kemampuan Anggaran WASH dan Gab	62
Daftar Pustaka	64

Daftar Singkatan

SDGs	: Sustainable Development Goals
WVI	: Wahana Visi Indonesia
NGO	: Non Government Organisation
WASH	: Water Sanitation and Hygiene
SDGs	: Sustainable Development Goals
USC	: Universal Service Coverage
AMSH	: Air Minum Sanitasi dan Hygiene
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pokja PKP	: Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
KPSPAM	: Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum
KPSPAM	: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten
RAD	: Rencana Aksi Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
CSR	: Corporate Social Responsibility
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
BPS	: Biro Pusat Statistik
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
RPJMD	: Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah
RENSTRA	: Rencana Strategis
RENJA	: Rencana Kerja
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DBH	: Dana Bagi Hasil
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Target 6 (SDG 6) adalah berikut ini: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air, sanitasi dan hygiene yang berkelanjutan untuk semua. SDG 6 berbicara tentang target air, sanitasi dan hygiene (cuci tangan pakai sabun) untuk semua orang, tidak ada yang tertinggal, atau dikenal dengan istilah Sustainable WASH for all, no one left behind. Cakupan layanan air, sanitasi dan hygiene diupayakan 100% untuk semua orang di semua komponen yaitu masyarakat, sekolah dan sarana kesehatan sampai tahun 2030 untuk mencapai Universal Service Coverage (USC) atau cakupan Universal Layanan AMSH (Air Minum, Sanitasi dan Higiene)

Air minum yang aman, sanitasi dan kebersihan (WASH) sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. WASH yang Aman bukan hanya prasyarat untuk kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada mata pencaharian, kehadiran di sekolah dan martabat serta membantu menciptakan masyarakat tangguh yang hidup di lingkungan yang sehat.

Layanan WASH di sarana kesehatan sangat penting untuk memberikan perawatan yang berkualitas, terutama untuk mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir, mengurangi dan mencegah infeksi selama persalinan dan perawatan ibu bersalin dan anak baru lahir termasuk mencegah wabah penyakit.

Layanan WASH di sarana pendidikan juga sangat penting. Setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas, yang mencakup akses terhadap layanan air minum, sanitasi dan kebersihan (WASH) selama di sekolah. Anak-anak menghabiskan sebagian besar hari mereka di sekolah, di mana layanan WASH dapat memengaruhi pembelajaran, kesehatan, dan martabat siswa, terutama bagi anak perempuan. Dimasukkannya WASH di sekolah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) target 4.a, 6.1, 6.2) menunjukkan peningkatan pengakuan akan pentingnya WASH sebagai komponen kunci dari 'lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif' dan sebagai bagian dari akses WASH universal, yang menekankan perlunya WASH di luar rumah.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi atau Universal Coverage, Pokja PKP Kabupaten Ende dan mitra pembangunan Wahana Visi Indonesia melakukan kolaborasi berbagi kegiatan mulai dari pengembangan toolkit sistem pembiayaan infrastruktur, penguatan kapasitas komite air atau KPSPAM termasuk mengembangkan bersama-sama roadmap model pembiayaan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dengan tujuan untuk melihat sejauhmana komitmen anggaran pemerintah untuk mendukung pencapaian WASH – Universal Coverage di tingkat kabupaten. Model ini berfokus pada penyediaan informasi tentang kebutuhan infrastruktur, operasional, pemeliharaan, dan operasi sistem pendanaan berkelanjutan untuk mencapai WASH Universal Coverage. Model ini juga akan fokus pada bagaimana komponen yang disebutkan di atas dapat direncanakan dan dipantau sebagai peta jalan untuk mencapai UC pada tahun 2030. Model ini akan mengacu dan diintegrasikan dengan kebijakan yang ada baik di tingkat Nasional maupun lokal (kabupaten) seperti Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Selain kedua dokumen sebagaimana disebutkan diatas, Kabupaten Ende sebelumnya sudah memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL 2022-2024 sebagai acuan bagi OPD terkait dalam membangun anggaran dalam dokumen perencanaan OPD dan pemerintah desa.

Alasan mendasar untuk mendukung pengembangan strategi pembiayaan WASH adalah untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai target nasional WASH dengan meningkatkan ekuitas, efektivitas, dan efisiensi pengeluaran WASH, dan dengan menarik sumber daya keuangan tambahan. Manfaat mengembangkan model/strategi keuangan WASH (UNICEF, 2022): Harapan kedepan, dengan adanya model pembiayaan air dan sanitasi serta dikembangkannya sistem pendanaan alternatif maka target pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi dapat tercapai.

Model Pembiayaan air minum dan sanitasi adalah dokumen strategis yang membantu para pengambil keputusan sektor air dan sanitasi untuk memastikan keberlanjutan anggaran dalam mendukung pencapaian 100% akses air dan sanitasi di Kabupaten Ende. Model pembiayaan air dan sanitasi menilai adanya kesenjangan keuangan pada sektor air dan sanitasi selama periode perencanaan yang panjang dan mengidentifikasi opsi untuk menutup kesenjangan keuangan (dengan memobilisasi lebih banyak sumber daya keuangan dengan menemukan cara untuk mengurangi biaya pencapaian target sektor air dan sanitasi), dan merekomendasikan kombinasi langkah-langkah kebijakan yang akan menutup kesenjangan keuangan (UNICEF, 2022).

Benefits of developing a WASH financial model/strategy (UNICEF, 2022):



TUJUAN :

Untuk menuju pada sebuah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan maka tujuan menjadi hal yang penting untuk dikemukakan agar semua pihak memahami tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan Road map yang dikembangkan bersamaini turut berkontribusi membantu pemerintah dalam beberap hal antara lain :

1. Mendukung perencanaan dan penganggaran 3 setting target yakni Komunitas, sarana kesehatan dan sarana pendidikan
2. Adanya informasi gap antara anggaran dan kebutuhan riil dilapangan sebagai data perencanaan bagi pemerintah baik pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.
3. Mendukung anternatif pendanaan dari sumber lainya seperti Perbankan, Koperasi Kredit maupun CSR



GAMBARAN UMUM AIR MINUM DAN SANITASI DI INDONESIA :

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	86.96%	86.96%
2019	88.70%	89.79%
2024	93.47%	93.47%
2030	100%	100%

Akses menyeluruh terhadap sumber air minum layak bagi semua tahun 2030

Sumber: Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman, Bappenas

Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. BAB sembarangan dan air limbah yang tidak diolah mengkontaminasi persediaan air dan menjadi sumber penyebaran penyakit diare juga kolera. Satu dari empat anak balita di Indonesia mengalami diare, yang merupakan penyebab utama kematian balita (UNICEF, 2018). Pada tahun 2018, 30,8% anak balita juga mengalami stunting (Risksdas, 2018). Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting.

Akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2018, sebesar 87,75% penduduk memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak termasuk yang bersumber dari perpipaan (20,14%) dan non-perpipaan (67,61%). Namun cakupan dari cadangan air yang dikelola secara aman masih rendah. Sebuah studi menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum yang aman hanya sebesar 8,5% (Hasil Survei Kualitas Air DIY, 2015). Berdasarkan data proxy dari studi tersebut, angka nasional hanya sebesar 6,8%.

Meskipun angka proyeksi pada tahun 2030 menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum layak sudah universal, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman dan sistem persediaan air perpipaan. Akses terhadap air minum aman ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2024 dan 43,15% pada tahun 2030. Sementara itu, akses terhadap sistem persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 30,54% pada tahun 2024, dan 53,94% pada tahun 2030.

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	86.96	86.96
2019	89.71	89.79
2024	99.54	100
2030	100	100

Akses menyeluruh terhadap sumber air minum layak, aman, dan sistem sumber air perpipaan bagi semua tahun 2030

Sumber: Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman, Bappenas

Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 15%

- Peningkatan keamanan sumber air minum secara kualitas dan kuantitas.
- Peningkatan cakupan sistem persediaan air perpipaan dan non-perpipaan.
- Peningkatan kapasitas operator dalam menyediakan sumber air minum aman.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan institusi
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi komunitas

Dukungan Pembiayaan Pembangunan Air Layak Sekitar 22 Juta SR Hingga Tahun 2024

- Penegakkan regulasi tarif FCR untuk swasembada dan pertumbuhan PDAM
- Optimisasi strategi pembiayaan dan inovasi pembiayaan, juga potensi PPP.

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 43,15%

- Penurunan layanan air bukan penerimaan dan kapasitas tunggu dari sistem penyediaan air.
- Percepatan pembangunan infrastruktur untuk sistem sumber air minum aman perpipaan.
- Pelaksanaan rencana pengamanan air untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman melalui keran.

Dukungan Pembiayaan Pembangunan Air Layak Sekitar 35.52 Juta SR Tahun 2030

- Optimisasi strategi pembiayaan dan inovasi pembiayaan, juga potensi PPP.

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	67.95	67.95
2019	77.83	76.91
2024	89.88	90
2030	100	100

Akses menyeluruh terhadap sanitasi layak bagi semua dapat tercapai tahun 2030

Proyeksi (baseline) menunjukkan bahwa target sanitasi tahun 2024 (90% RT) dan target tahun 2030 (100% RT) akan terpenuhi

Sumber: SUSENAS, BPS
Proyeksi: Bappenas (berdasarkan target sanitasi SDGs)

Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 90% (termasuk 20% sanitasi aman) dan menurunkan BAB sembarangan hingga 0%:

- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk pengelolaan lumpur tinja dan sistem pembuangan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan multi-pihak (swasta dan akademisi)
- Penguatan fungsi pengaturan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah.
- Pembuatan regulasi pengelolaan air limbah dan memastikan implementasinya di daerah termasuk alokasi pendanaan untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk layanan sanitasi, mekanisme insentif, hukuman, subsidi, dan kewajiban bagi rumah tangga untuk memiliki akses terhadap sanitasi aman.
- Penguatan implementasi program perubahan perilaku untuk menghentikan praktik BAB sembarangan, termasuk mekanisme pemantauan secara berkala dan asistensi berkualitas bagi komunitas, desa, dan pemerintah daerah.
- Pengembangan mekanisme pembiayaan berkualitas, termasuk pembiayaan inovatif, subsidi pintar, dan belanja berkualitas untuk pembangunan sanitasi.

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 100% (termasuk 53,71% sanitasi aman):

- Penguatan layanan sanitasi berkelanjutan.
- Percepatan peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman.
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sistem sanitasi dan implementasi program sanitasi.
- Pelaksanaan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengembangkan program sanitasi.
- Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan sanitasi layak.

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	67.95	67.95
2019	76.91	77.83
2024	89.88	89.88
2030	100	100

Akses menyeluruh terhadap sanitasi layak bagi semua dapat tercapai tahun 2030

Proyeksi (baseline) menunjukkan bahwa target sanitasi tahun 2024 (90% RT) dan target tahun 2030 (100% RT) akan terpenuhi

Sumber: SUSENAS, BPS
Proyeksi: Bappenas (berdasarkan target sanitasi SDGs)

Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 90% (termasuk 20% sanitasi aman) dan menurunkan BAB sembarangan hingga 0%:

- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk pengelolaan lumpur tinja dan sistem pembuangan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan multi-pihak (swasta dan akademisi)
- Penguatan fungsi pengaturan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah.
- Pembuatan regulasi pengelolaan air limbah dan memastikan implementasinya di daerah termasuk alokasi pendanaan untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk layanan sanitasi, mekanisme insentif, hukuman, subsidi, dan kewajiban bagi rumah tangga untuk memiliki akses terhadap sanitasi aman.
- Penguatan implementasi program perubahan perilaku untuk menghentikan praktik BAB sembarangan, termasuk mekanisme pemantauan secara berkala dan asistensi berkualitas bagi komunitas, desa, dan pemerintah daerah.
- Pengembangan mekanisme pembiayaan berkualitas, termasuk pembiayaan inovatif, subsidi pintar, dan belanja berkualitas untuk pembangunan sanitasi.

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 100% (termasuk 53,71% sanitasi aman):

- Penguatan layanan sanitasi berkelanjutan.
- Percepatan peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman.
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sistem sanitasi dan implementasi program sanitasi.
- Pelaksanaan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengembangkan program sanitasi.
- Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan sanitasi layak.

Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 90% (termasuk 20% sanitasi aman) dan menurunkan BAB sembarangan hingga 0%:

- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk pengelolaan lumpur tinja dan sistem pembuangan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan multi-pihak (swasta dan akademisi)
- Penguatan fungsi pengaturan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah.
- Pembuatan regulasi pengelolaan air limbah dan memastikan implementasinya di daerah termasuk alokasi pendanaan untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk layanan sanitasi, mekanisme insentif, hukuman, subsidi, dan kewajiban bagi rumah tangga untuk memiliki akses terhadap sanitasi aman.
- Penguatan implementasi program perubahan perilaku untuk menghentikan praktik BAB sembarangan, termasuk mekanisme pemantauan secara berkala dan asistensi berkualitas bagi komunitas, desa, dan pemerintah daerah.
- Pengembangan mekanisme pembiayaan berkualitas, termasuk pembiayaan inovatif, subsidi pintar, dan belanja berkualitas untuk pembangunan sanitasi.

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 100% (termasuk 53,71% sanitasi aman):

- Penguatan layanan sanitasi berkelanjutan.
- Percepatan peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman.
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sistem sanitasi dan implementasi program sanitasi.
- Pelaksanaan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengembangkan program sanitasi.
- Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan sanitasi layak.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN ENDE

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki wilayah seluas 2.067,75 km², dengan batas-batas, sebagai berikut:

- ? Sebelah Utara : Laut Flores
- ? Sebelah Timur : Kabupaten Sikka
- ? Sebelah Selatan : Laut Sawu
- ? Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo

Secara administrasi wilayah Kabupaten Ende terdiri atas **21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan**. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Wewaria (14,05%), diikuti Maukaro (10,39 %), Kotabaru (9,58 %) dan Nangapanda (9,13%), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ende Tengah (0,28%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan kelurahan, yaitu: Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan Desa dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Tabel 2.1. Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Jarak, Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Nama Ibukota	Jarak ke Ibukota Kab. (km)	Luas wilayah		Jumlah	
				(km ²)	%	Desa	Kel.
1	Nangapanda	Ndorurea	29,00	190,31	9,13	28	1
2	Pulau Ende	Rendoraterua	17,87	10,22	0,49	9	-
3	Maukaro	Maukaro	97,00	216,66	10,39	11	-
4	Ende	Nangaba	9,00	164,99	7,91	32	-
5	Ende Selatan	Mbongawani	1,49	19,57	0,94	-	5
6	Ende Timur	Wolowona	4,55	19,63	0,94	3	3
7	Ende Tengah	Paupire	3,50	5,75	0,28	-	4
8	Ende Utara	Kotaratu	0,02	17,52	0,84	6	4
9	Ndona	Ndona	8,00	93,52	4,48	12	2
10	Ndona Timur	Demulaka	45,00	52,84	2,53	7	-
11	Wolowaru	Bokasape	65,00	64,53	3,09	16	1
12	Wolojita	Wolojita	72,00	39,77	1,91	5	1
13	Lio Timur	Watuneso	92,00	53,93	2,59	12	1
14	Kelimutu	Woloara	52,00	54,03	2,59	9	-
15	Ndori	Maubasa	87,00	26,71	1,28	10	-
16	Maurole	Maurole	84,00	155,14	7,44	13	-
17	Kotabaru	Kotabaru	117,00	199,70	9,58	13	-
18	Detukeli	Watunggere	57,00	112,29	5,38	13	-
19	Lepembusu Kelisoke	Peibenga	58,00	150,88	7,24	14	-
20	Detusoko	Detusoko	33,00	144,27	6,92	20	1
21	Wewaria	Welamosa	53,00	292,94	14,05	22	-
Total				2.085,19	100	255	23

Sumber Data: Ende Dalam Angka 2023, (Olahan Bappeda)

Pada Tahun 2019, telah dipersiapkan proses pemekaran Desa untuk diusulkan ke pusat, yaitu sebanyak 9 Desa di 7 Kecamatan dan sampai dengan saat ini masih berstatus Desa Persiapan dan sedang dalam proses pengusulan ke tingkat Provinsi dan Pusat, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kecamatan dan Desa Pemekaran

Kecamatan	Desa Persiapan	Desa Induk
Wolojita	Waga	Pora
Kelimutu	Woloara Barat	Woloara
Wolowaru	Mbuliweragheta	Nakambara
Wewaria	Mautenda Selatan	Mautenda
Nangapanda	Maurongga	Rapprendu
	Rendorua	Raporendu
	Tanarangga	Bheramari dan Jegharangga
Kotabaru	Kotabaru Tengah	Kotabaru
Ende	Tomberabu III	Tomberabu I

2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat $121^{\circ}21' 6,44''$ sampai dengan koordinat $122^{\circ} 1' 28,1604''$ Bujur Timur dan $08^{\circ} 55' 28,35''$ sampai dengan $08^{\circ} 26' 4,10''$ Lintang Selatan.

b. Posisi Geostrategik

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain :

1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores.

2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu.

3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan focal point keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores.

4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila.

b. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Publikasi BPS Ende (Ende Dalam Angka Tahun 2023), menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2022 mencapai 273.553 jiwa terdiri atas 133.848 jiwa penduduk laki-laki dan 139.705 penduduk perempuan, Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020), terjadi peningkatan sebesar 2.790 jiwa dari keadaan 270.763 jiwa pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,59%. Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan ($\pm 32,13\%$), terutama di Kecamatan Ende Selatan (9,48%). Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut mempengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di kecamatan Ende Selatan sebanyak 25.966 jiwa, disusul Kecamatan Ende Tengah sebanyak 23.837 jiwa dan Nangapanda sebanyak 23.114 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur, yaitu sebanyak 5.041 jiwa. Dengan luas wilayah 2,085,19 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende Tahun 2022 adalah sebesar 131,19 jiwa/km². Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (4.149 jiwa/km²), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Lepembusu Kelisoke dengan tingkat kepadatan 35,60 jiwa/km². Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan Tahun 2022 adalah sebesar 95,80%.

USIA	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	L	P	Total	%	L	P	Total	%
Anak-anak (0 - 14 Tahun)	42.107	40.451	82.558	30,14	35.982	33.876	69.858	25,80	35.942	33.901	69.843	25,67	35.933	33.950	69.883	25,55
Dewasa (15 - 49 Tahun)	64.400	74.547	138.947	50,72	71.821	73.792	145.613	53,78	72.070	73.806	145.876	53,63	72.348	73.847	146.195	53,44
Lanjut Usia (Diatas 50 Tahun)	23.100	29.324	52.424	19,14	24.742	30.550	55.292	20,42	25.154	31.125	56.359	20,69	25.567	31.908	57.475	21,01
Total	129.607	144.322	273.929	100	132.545	138.218	270.763	100	133.166	138.832	272.078	100	139.705	139.705	273.553	100

Sumber Data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2023

c. Kondisi/Kawasan

1) Wilayah Pedalaman Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndonga, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur.

2) Wilayah Terpencil

Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndonga, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndonga Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke.

3) Kawasan Pesisir/Kepulauan, Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu :

□ Kawasan Pesisir Utara, meliputi : Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan Kotabaru.

□ Kawasan Pesisir Selatan, meliputi : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ende Timur, Ndonga, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur , dan Pulau Ende. ***RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMERINTAH DAERAH KAB. ENDE TAHUN 2025-2026***

□ Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu: Pulau Ende.

4) Kawasan Pegunungan Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua) gunung berapi aktif, yaitu: Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemang Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada di Kabupaten Ende. Dilihat dari Tingkat Perkembangannya, dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende

dikategorikan sebagai:

1) Desa Tertinggal, sebanyak 113 Desa atau sebesar 44,31%;

2) Desa Berkembang, sebanyak 133 Desa atau sebesar 52,16%;

3) Desa Maju, sebanyak 9 Desa atau sebesar 3,53%.

Dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Dapat dilihat ditabel berikut dibawah ini

ROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk					Rata-rata Pertumbuhan
		2023	2028	2033	2038	2043	
1	Nangapanda	23.189	23.570	23.957	24.350	24.749	0,02
2	Pulau Ende	8.705	8.871	9.040	9.213	9.389	0,02
3	Maukaro	7.852	7.993	8.136	8.282	8.431	0,02
4	Ende	17.643	18.099	18.568	19.048	19.541	0,03
5	Ende Selatan	26.084	26.680	27.289	27.913	28.551	0,02
6	Ende Timur	19.537	19.796	20.058	20.324	20.593	0,01
7	Ende Tengah	24.010	24.891	25.806	26.754	27.736	0,04
8	Ende Utara	18.390	18.798	19.214	19.639	20.074	0,02
9	Ndona	14.005	14.299	14.600	14.907	15.220	0,02
10	Ndona Timur	5.063	5.175	5.290	5.407	5.527	0,02
11	Wolowaru	16.450	16.853	17.267	17.691	18.125	0,02
12	Wolojita	6.300	6.431	6.564	6.700	6.840	0,02
13	Lio Timur	8.033	8.097	8.162	8.228	8.294	0,01
14	Kelimutu	7.138	7.396	7.663	7.940	8.227	0,04
15	Ndori	5.840	5.886	5.932	5.978	6.025	0,01
16	Maurole	11.691	11.958	12.231	12.511	12.797	0,02
17	Kota Baru	10.491	10.625	10.760	10.896	11.034	0,01
18	Detukeli	6.860	7.066	7.277	7.495	7.720	0,03
19	Lepembusu Kelisoke	5.401	5.550	5.702	5.859	6.020	0,03
20	Detusoko	14.373	14.599	14.828	15.061	15.298	0,02
21	Wewaria	17.647	17.896	18.149	18.405	18.665	0,01
	Jumlah	274.702	280.529	286.494	292.602	298.856	0,44

PROPORSI DAN PROYEKSI PENDUDUK PERKOTAAN DAN PERDESAAN

No	Kecamatan	Proyeksi dan Proporsi Penduduk							
		2028		2033		2038		2043	
		Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
Penduduk Perkotaan									
1	Ende Selatan	26.680	32,14%	27.289	32,24%	27.913	32,34%	28.551	32,44%
2	Ende Timur	19.796		20.058		20.324		20.593	
3	Ende Tengah	24.891		25.806		26.754		27.736	
4	Ende Utara	18.798		19.214		19.639		20.074	
Penduduk Perdesaan									
1	Nangapanda	23.570	67,86%	23.957	67,76%	24.350	67,66%	24.749	67,56%
2	Pulau Ende	8.871		9.040		9.213		9.389	
3	Maukaro	7.993		8.136		8.282		8.431	
4	Ende	18.099		18.568		19.048		19.541	
5	Ndona	14.299		14.600		14.907		15.220	
6	Ndona Timur	5.175		5.290		5.407		5.527	
7	Wolowaru	16.853		17.267		17.691		18.125	
8	Wolojita	6.431		6.564		6.700		6.840	
9	Lio Timur	8.097		8.162		8.228		8.294	
10	Kelimutu	7.396		7.663		7.940		8.227	
11	Ndori	5.886		5.932		5.978		6.025	
12	Maurole	11.958		12.231		12.511		12.797	
13	Kota Baru	10.625		10.760		10.896		11.034	
14	Detukeli	7.066		7.277		7.495		7.720	
15	Lepembusu Kelisoke	5.550		5.702		5.859		6.020	
16	Detusoko	14.599		14.828		15.061		15.298	
17	Wewaria	17.896		18.149		18.405		18.665	
Jumlah Penduduk		280.529	100%	286.494	100%	292.602	100%	298.856	100%

d. Pembagian Wilayah Pelayanan

Pembagian Wilayah Pelayanan berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ende dapat diklasifikasikan se agai berikut:

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA			NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL			DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
1.	NANGAPANDA		Pedalaman			17) Desa Uzuramba			Terpencil
	1) Kelurahan Ndorurea		Pedalaman			18) Desa Tonggopapa		Pedalaman	
	2) Desa Ondorea		Pedalaman			19) Desa Embutheru		Pedalaman	
	3) Desa Nggorea		Pedalaman			20) Desa Nua Ja		Pedalaman	
	4) Desa Raporendu		Pedalaman			21) Desa Wawonato			Terpencil
	5) Desa Bheramari		Pedalaman			22) Desa Jejaraja			Terpencil
	6) Desa Kerirea			Terpencil		23) Desa Nemboramba		Pedalaman	
	7) Desa Tendarea			Terpencil		24) Desa Embu Ngena		Pedalaman	
	8) Desa Tendambepa			Terpencil		25) Desa Rhandorama		Pedalaman	
	9) Desa Rapowawo		Pedalaman			26) Desa Tendambonggi		Pedalaman	
	10) Desa Watumite			Terpencil		27) Desa Wologai Dua			Terpencil
	11) Desa Zozozea		Pedalaman			28) Desa Worhopapa		Pedalaman	
	12) Desa Ndorurea I		Pedalaman			29) Desa Ranoramba		Pedalaman	
	13) Desa Ndeturea		Pedalaman			30) Desa Peozakaramba		Pedalaman	
	14) Desa Sanggarhorho		Pedalaman			31) Desa Uzuramba Barat			Terpencil
	15) Desa Tiwerea			Terpencil		32) Desa Wajakea Jaya		Pedalaman	
	16) Desa Jegharangga		Pedalaman		4.	ENDE SELATAN	Kota		
	17) Desa Penggajawa		Pedalaman			1) Kelurahan Paupanda	Kota		
	18) Desa Ondorea Barat		Pedalaman			2) Kelurahan Rukunlima	Kota		
	19) Desa Uzuzozo			Terpencil		3) Kelurahan Mbongawani	Kota		
	20) Desa Timbazia		Pedalaman			4) Kelurahan Tetandara	Kota		
	21) Desa Mbobhenga		Pedalaman			5) Kelurahan Tanjung	Kota		
	22) Desa Malawaru			Terpencil	5.	NDONA	Kota	Pedalaman	
	23) Desa Anaraja		Pedalaman			1) Kelurahan Lokoboko	Kota		
	24) Desa Kekandere		Pedalaman			2) Kelurahan Onelako	Kota		
	25) Desa Tanazozo		Pedalaman			3) Desa Nanganesa	Kota		
	26) Desa Tenda Ondo			Terpencil		4) Desa Manulondo	Kota		
	27) Desa Jemburea			Terpencil		5) Desa Wolotopo		Pedalaman	
	28) Desa Embuzozo		Pedalaman			6) Desa Wolotopo Timur		Pedalaman	
	29) Desa Romarea			Terpencil		7) Desa Ngaluroga		Pedalaman	
3.	ENDE		Pedalaman			8) Desa Ngalupolo		Pedalaman	
	1) Desa Rukuramba		Pedalaman			9) Desa Kekasewa			Terpencil
	2) Desa Riaraja		Pedalaman			10) Desa Nila			Terpencil
	3) Desa Mbotutenda			Terpencil		11) Desa Puutuga		Pedalaman	
	4) Desa Wologai			Terpencil		12) Desa Wolokota			Terpencil
	5) Desa Ndetundora I		Pedalaman			13) Desa Kelikiku		Pedalaman	
	6) Desa Ndetundora II		Pedalaman			14) Desa Reka		Pedalaman	
	7) Desa Tomberabu I		Pedalaman		6.	DETUSOKO		Pedalaman	
	8) Desa Tomberabu II			Terpencil		1) Kelurahan Detusoko		Pedalaman	
	9) Desa Nakuramba		Pedalaman			2) Desa Nuaone		Pedalaman	
	10) Desa Wolokaro		Pedalaman			3) Desa Ranga		Pedalaman	
	11) Desa Ja Mokeasa			Terpencil		4) Desa Wolomage		Pedalaman	
	12) Desa Emburia		Pedalaman						
	13) Desa Randotonda		Pedalaman						
	14) Desa Raburia			Terpencil					
	15) Desa Tinabani			Terpencil					

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA			NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL			DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	6) Desa Rateroru		Pedalaman			13) Desa Wolosoko		Pedalaman	
	7) Desa Dile		Pedalaman			14) Desa Niramesi			Terpencil
	8) Desa Roa		Pedalaman			15) Desa Nakambara		Pedalaman	
	9) Desa Wolotolo		Pedalaman			16) Desa Tana Lo'o		Pedalaman	
	10) Desa Wolotolo Tengah		Pedalaman			17) Desa Lise Pu'u		Pedalaman	
	11) Desa Randoria		Pedalaman		9.	WOLOJITA		Pedalaman	
	12) Desa Wolomasi		Pedalaman			1) Kelurahan Wolojita		Pedalaman	
	13) Desa Saga		Pedalaman			2) Desa Nuamulu		Pedalaman	
	14) Desa Ndito		Pedalaman			3) Desa Nggela		Pedalaman	
	15) Desa Niowula		Pedalaman			4) Desa Pora		Pedalaman	
	16) Desa Wolofeo		Pedalaman			5) Desa Tenda		Pedalaman	
	17) Desa Sipijena		Pedalaman			6) Desa Wiwipemo		Pedalaman	
	18) Desa Detusoko Barat		Pedalaman		10.	MAUROLE		Pedalaman	
	19) Desa Wologai		Pedalaman			1) Desa Maurole		Pedalaman	
	20) Desa Wologai Tengah		Pedalaman			2) Desa Mausambi		Pedalaman	
	21) Desa Turunalu		Pedalaman			3) Desa Watukamba		Pedalaman	
7.	WEWARIA		Pedalaman			4) Desa Aewora		Pedalaman	
	1) Desa Mukusaki		Pedalaman			5) Desa Keliwumbu		Pedalaman	
	2) Desa Aemuri		Pedalaman			6) Desa Ranokolo		Pedalaman	
	3) Desa Ekoae		Pedalaman			7) Desa Ranokolo Selatan		Pedalaman	
	4) Desa Wewaria		Pedalaman			8) Desa Otogedu			Terpencil
	5) Desa Fataatu Timur		Pedalaman			9) Desa Detuwulu			Terpencil
	6) Desa Fataatu		Pedalaman			10) Desa Woloau		Pedalaman	
	7) Desa Welamosa		Pedalaman			11) Desa Ngalukoja		Pedalaman	
	8) Desa Nuangenda		Pedalaman			12) Desa Niranusa		Pedalaman	
	9) Desa Detubela		Pedalaman			13) Desa Uludala		Pedalaman	
	10) Desa Tanali		Pedalaman		11.	MAUKARO		Pedalaman	
	11) Desa Ratewati		Pedalaman			1) Desa Kamubheka		Pedalaman	
	12) Desa Mautenda Barat			Terpencil		2) Desa Kebirangga		Pedalaman	
	13) Desa Mbotulaka			Terpencil		3) Desa Kebirangga Selatan			Terpencil
	14) Desa Mautenda		Pedalaman			4) Desa Nabe		Pedalaman	
	15) Desa Kelitembu		Pedalaman			5) Desa Kobaleba		Pedalaman	
	16) Desa Numba			Terpencil		6) Desa Boafeo			Terpencil
	17) Desa Aelipo			Terpencil		7) Desa Magekapa		Pedalaman	
	18) Desa Ratewati Selatan			Terpencil		8) Desa Mundinggasa		Pedalaman	
	19) Desa Waka			Terpencil		9) Desa Kolikapa		Pedalaman	
	20) Desa Woloaja			Terpencil		10) Desa Kebirangga Tengah		Pedalaman	
	21) Desa Ekolea		Pedalaman			11) Desa Natanangge		Pedalaman	
	22) Desa Aendoko		Pedalaman		12.	LIO TIMUR		Pedalaman	
8.	WOLOWARU		Pedalaman			1) Kelurahan Watuneso		Pedalaman	
	1) Kelurahan Bokasape		Pedalaman			2) Desa Hobatuwa		Pedalaman	
	2) Desa Mbuliwaralau		Pedalaman			3) Desa Wolosambi		Pedalaman	
	3) Desa Mbuliloo		Pedalaman			4) Desa Woloaro		Pedalaman	
	4) Desa Jopu		Pedalaman			5) Desa Detupera			Terpencil
	5) Desa Rindiwawo		Pedalaman			6) Desa Wololele A			Terpencil
	6) Desa Lisedetu		Pedalaman			7) Desa Liabeke		Pedalaman	
	7) Desa Mbuliwaralau Utara		Pedalaman			8) Desa Fatamari			Terpencil
	8) Desa Bokasape Timur		Pedalaman			9) Desa Ranggatalo		Pedalaman	
	9) Desa Nualise		Pedalaman			10) Desa Nualima		Pedalaman	
	10) Desa Liselowobora		Pedalaman			11) Desa Tanaroga		Pedalaman	
	11) Desa Likanaka			Terpencil		12) Desa Bu Tanalagu			Terpencil
	12) Desa Wolokoli		Pedalaman			13) Desa Mbewawora			Terpencil

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA			NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA				
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL			DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL		
13.	KOTA BARU		Pedalaman								
	1) Desa Kotabaru		Pedalaman			3) Desa Serandori					Terpencil
	2) Desa Tou		Pedalaman			4) Desa Kelisamba					Terpencil
	3) Desa Tou Timur		Pedalaman			5) Desa Maubasa Timur					Terpencil
	4) Desa Loboniki		Pedalaman			6) Desa Mole					Terpencil
	5) Desa Hangalande			Terpencil		7) Desa Lunggaria					Terpencil
	6) Desa Ndondo		Pedalaman			8) Desa Aebara					Terpencil
	7) Desa Niopanda			Terpencil		9) Desa Ratemangga					Terpencil
	8) Desa Tou Barat		Pedalaman			10) Desa Maubasa Barat					Terpencil
	9) Desa Liselande			Terpencil	18.	ENDE UTARA	Kota				
	10) Desa Rangalaka		Pedalaman			1) Kelurahan Kotaratu	Kota				
	11) Desa Pise			Terpencil		2) Kelurahan Kotaraja	Kota				
	12) Desa Neotonda		Pedalaman			3) Kelurahan Roworena	Kota				
	13) Desa Nuanaga		Pedalaman			4) Kelurahan Roworena Barat	Kota				
14.	KELIMUTU		Pedalaman			5) Desa Borokanda	Kota				
	1) Desa Nduaria		Pedalaman			6) Desa Watusipi		Pedalaman			
	2) Desa Nuamuri		Pedalaman			7) Desa Gheoghoma	Kota				
	3) Desa Nuamuri Barat		Pedalaman			8) Desa Mbomba	Kota				
	4) Desa Woloara		Pedalaman			9) Desa Embundoa	Kota				
	5) Desa Koanara		Pedalaman			10) Desa Raterua	Kota				
	6) Desa Pemo		Pedalaman		19.	ENDE TENGAH	Kota				
	7) Desa Waturaka		Pedalaman			1) Kelurahan Potulando	Kota				
	8) Desa Detuena		Pedalaman			2) Kelurahan Onekore	Kota				
	9) Desa Wolokelo		Pedalaman			3) Kelurahan Kelimutu	Kota				
15.	DETUKELI			Terpencil		4) Kelurahan Paupire	Kota				
	1) Desa Maurole Selatan			Terpencil	20.	ENDE TIMUR	Kota				
	2) Desa Detumbewa			Terpencil		1) Kelurahan Mautapaga	Kota				
	3) Desa Nggesa			Terpencil		2) Kelurahan Rewarangga	Kota				
	4) Desa Watunggere			Terpencil		3) Kelurahan Rewarangga Selatan	Kota				
	5) Desa Nida			Terpencil		4) Desa Nduangga		Pedalaman			
	6) Desa Kanganara			Terpencil		5) Desa Tiwutewa		Pedalaman			
	7) Desa Kebesani			Terpencil		6) Desa Kedebodu		Pedalaman			
	8) Desa Detukeli			Terpencil	21.	LEPEMBUSU KELISOKE					Terpencil
	9) Desa Wolomuku			Terpencil		1) Desa Wologai Timur					Terpencil
	10) Desa Unggu			Terpencil		2) Desa Nggumbelaka					Terpencil
	11) Desa Nggesa Biri			Terpencil		3) Desa Mukureku					Terpencil
	12) Desa Watunggere Marilonga			Terpencil		4) Desa Kuru					Terpencil
	13) Desa Jeo Du'a			Terpencil		5) Desa Ndenggarongge					Terpencil
16.	NDONA TIMUR			Terpencil		6) Desa Ndikosapu					Terpencil
	1) Desa Kurulimbu			Terpencil		7) Desa Tanalangi					Terpencil
	2) Desa Sokoria			Terpencil		8) Desa Taniwoda					Terpencil
	3) Desa Demulaka			Terpencil		9) Desa Detuara					Terpencil
	4) Desa Roga			Terpencil		10) Desa Kuru Sare					Terpencil
	5) Desa Kurulimbu Selatan			Terpencil		11) Desa Lise Kuru					Terpencil
	6) Desa Nggewa			Terpencil		12) Desa Rutu Jeja					Terpencil
	7) Desa Sokoria Selatan			Terpencil		13) Desa Mukereku Sa Ate					Terpencil
17.	NDORI			Terpencil		14) Desa Tiwusora					Terpencil
	1) Desa Wonda			Terpencil							
	2) Desa Maubasa			Terpencil							
	3) Desa Serandori			Terpencil							
						JUMLAH DESA & KELURAHAN	25	163			90

3. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pegunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan, sementara dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah Kabupaten Ende (421 km²) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).

Tabel 2.5. Ketinggian Rata2 dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL (Ha)							Total Luas Wilayah (km ²)
		0-250 mdpl (Ha)	250-500 mdpl (Ha)	500-750 mdpl (Ha)	750-1000 mdpl (Ha)	1000-1250 mdpl (Ha)	1250-1500 Mdpl (Ha)	1500-1750 mdpl (Ha)	
1	Nangapanda	7.421,70	8.346,41	2.674,28	589,04	-	-	-	19.031,40
2	Pulau Ende	920,83	100,67	-	-	-	-	-	1.021,51
3	Maukaro	8.870,32	6.943,58	4.118,39	1.622,40	110,83	-	-	21.665,52
4	Ende	2.382,52	5.495,37	4.745,90	3.012,09	863,15	-	-	16.499,08
5	Ende Selatan	1.427,21	464,25	65,54	-	-	-	-	1.956,99
6	Ende Timur	832,46	657,72	389,7	83,33	-	-	-	1.963,20
7	Ende Tengah	516,54	55,13	2,85	-	-	-	-	574,50
8	Ende Utara	1.159,15	503,5	88,96	-	-	-	-	1.751,57
9	Ndona	2.835,91	2.411,57	1.828,68	1.589,12	515,03	171,76	-	9.352,08
10	Ndona Timur	-	362,07	854,98	1.647,20	1.423,43	861,38	135,11	5.284,18
11	Wolowaru	1.261,68	2.042,74	1.662,53	945,96	408,29	131,83	-	6.453,03
12	Wolojita	841,59	990,61	932,46	547,31	282,36	328,07	54,19	3.976,60
13	Lio Timur	1.318,14	1.851,67	1.089,04	700,4	238,08	179,79	15,87	5.392,99
14	Kelimutu	-	-	487,67	1.437,66	1.952,31	972,55	553,01	5.403,18
15	Ndori	286,25	1.247,86	131,88	-	-	-	-	2.670,99
16	Maurole	7.817,53	4.535,17	2.122,08	925,29	-	-	-	15.513,89
17	Kotabaru	1.052,09	4.097,43	2.981,29	1.483,23	834,5	71,52	-	19.970,11
18	Detukeli	831,34	3.930,80	3.592,46	1.972,77	866,42	34,77	-	11.228,56
19	Lepembusu Kelisoke	314,77	1.481,83	2.622,28	3.002,15	4.133,13	3.140,52	393,68	15.088,34
20	Detusoko	66,09	1.147,50	3.446,80	4.313,20	3.246,64	1.676,31	530,64	14.427,20
21	Wewaria	18.272,68	7.573,47	2.248,06	651,44	406,71	141,86	-	29.294,16

Sumber: Dinas PUPR Kab.Ende 2023, BPS, Ende Dalam Angka 2023 , (Data olahan Bappeda)

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,11% atau ±1.195 km²) berada pada kemiringan diatas 40%. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (Lereng) – Slope (%)								Total Luas Wilayah (km ²)
		0-3% slope		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope		
		%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	
1	Nangapanda	5,20	989,63	6,56	1.248,46	83,81	15.950,22	4,43	843,09	19.031,40
2	Pulau Ende	5,50	56,18	7,01	71,61	5,34	54,55	82,15	839,17	1.021,51
3	Maukaro	2,30	498,31	4,12	892,62	23,55	5.102,23	70,03	15.172,36	21.665,52
4	Ende	2,41	397,63	8,49	1.400,77	8,68	1.432,12	80,42	13.268,56	16.499,08
5	Ende Selatan	6,60	129,16	22,08	432,10	36,11	706,67	35,21	689,06	1.956,99
6	Ende Timur	4,71	92,47	15,26	299,58	17,58	345,13	62,45	1.226,02	1.963,20
7	Ende Tengah	7,97	45,79	34,44	197,86	22,62	129,95	34,97	200,90	574,50
8	Ende Utara	4,21	73,74	15,23	266,76	13,03	228,23	67,53	1.182,84	1.751,57
9	Ndona	0,41	38,34	-	-	22,73	2.125,73	76,86	7.188,01	9.352,08
10	Ndona Timur	0,28	14,80	-	-	21,31	1.126,06	78,41	4.143,33	5.284,18
11	Wolowaru	-	-	3,38	218,11	17,73	1.144,12	78,89	5.090,80	6.453,03
12	Wolojita	-	-	3,43	136,40	22,32	887,58	74,25	2.952,63	3.976,60
13	Lio Timur	-	-	3,28	176,89	17,40	938,38	79,32	4.277,72	5.392,99
14	Kelimutu	-	-	5,11	276,10	26,20	1.415,63	68,69	3.711,44	5.403,18
15	Ndori	-	-	2,94	78,53	29,76	794,89	67,30	1.797,58	2.670,99
16	Maurole	3,94	611,25	5,78	896,70	42,72	6.627,53	47,56	7.378,41	15.513,89
17	Kotabaru	0,33	65,90	5,62	1.122,32	46,59	9.304,07	47,46	9.477,81	19.970,11
18	Detukeli	6,60	741,08	8,21	921,86	17,45	1.959,38	67,74	7.606,23	11.228,56

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (Lereng) – Slope (%)								Total Luas Wilayah (km ²)
		0-3% slope		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope		
		%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	
19	Lepembusu Kelisoke	1,32	199,17	4,28	645,78	12,39	1.869,45	82,01	12.373,95	15.088,34
20	Detusoko	3,21	463,11	6,14	885,83	40,58	5.854,56	50,07	7.223,70	14.427,20
21	Wewaria	3,61	1.057,52	6,49	1.901,19	40,30	11.805,55	49,60	14.529,90	29.294,16
Total Luasan (km²)			5.474,08		12.069,49		69.802,02		121.173,49	
% Terhadap Total Wilayah			2,63		5,79		31,79		58,11	

Sumber: Ende Dalam Angka Tahun 2018 (Data Olahan Bapeda)

4. Geologi

Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0–30 cm; dan 11,32% memiliki kedalaman tanah efektif 30–60 cm; serta 30,22% memiliki kedalaman tanah efektif 60–90 cm; sementara itu 5,5% wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm.

Jenis tanah di Kabupaten Ende di dominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 44,87% tekstur tanah sedang, 45,46% tekstur tanah kasar, 9,24% tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 0,43% tidak dikategorikan.

Tabel 2.7. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Tekstur			Total Luas Wilayah (km ²)
		Sedang	Kasar	Halus	
1	Nangapanda	35,13	33,69	31,18	19.031,40
2	PulauEnde	35,28	33,71	31,01	1.021,51
3	Maukaro	33,05	34,19	32,67	21.665,52
4	Ende	50,09	49,91	-	16.499,08
5	EndeSelatan	49,92	50,08	-	1.956,99
6	EndeTimur	49,89	50,11	-	1.963,20
7	EndeTengah	50,14	49,86	-	574,50
8	EndeUtara	49,90	50,10	-	1.751,57
9	Ndona	49,67	50,33	-	9.352,08
10	Ndona Timur	40,64	50,36	-	5.284,18
11	Wolowaru	49,70	50,30	-	6.453,03
12	Wolojita	49,71	50,29	-	3.976,60
13	Lio Timur	49,71	50,29	-	5.392,99
14	Kelimutu	49,63	50,37	-	5.403,18
15	Ndori	49,71	50,29	-	2.670,99
16	Maurole	50,00	50,00	-	15.513,89
17	Kotabaru	50,00	50,00	-	19.970,11
18	Detukeli	50,00	50,00	-	11.228,56
19	Lepembusu Kelisoke	33,42	33,55	33,03	15.088,34
20	Detusoko	33,30	33,56	33,14	14.427,20
21	Wewaria	33,35	33,61	33,04	29.294,16

Sumber: Ende Dalam Angka 2018 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende), data olahan Bappeda

5. Hidrologi

Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain Kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4-17 liter/detik.

Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya: Mata Air Woloare, Aekipa, Aepana, Nangapanda, Ae Ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fiko dan Lio Lo'o telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.

Tabel 2.8. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Nama Sungai (DAS)	Nama Mata Air (debit-liter/detik)	Keterangan
1	Nangapanda	Lowo Nangapanda	Mata Air Nangapanda (10)	PDAM Nangapanda
2	Pulau Ende			
3	Maukaro	Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo		
4	Ende	Lowo Nangaba		PDAM / IKK Nangaba
5	Ende Selatan			
6	Ende Timur	Lowo Wolowona	Mata Air Aewanda	

No	Kecamatan	Nama Sungai (DAS)	Nama Mata Air (debit-liter/detik)	Keterangan
7	Ende Tengah			
8	Ende Utara	Manungae	Mata Air Woloare (4), Mata air Aemuri (5)	PDAM Kota Ende
9	Ndona	Lowo Wolotopo dan Ngalupolo	Mata Air Aepana (19), Mata air Aekipa (12)	PDAM Kota Ende dan Ndona
10	Ndona Timur	Lowo Aebai, LowoRia		
11	Wolowaru	Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo	Mata Air Lia Lo'o(7), Seke Mele(-)	PDAM Wolowaru
12	Wolojita	Lowo Aebai		
13	Lio Timur	Lowo Lise		
14	Kelimutu	Lowo Aebara, Lowo Ria	Mata air Moni (4)	
15	Ndori	Lowo Ria		
16	Maurole	Lowo bajo	Mata Air Ae Ino (7)	PDAM Maurole
17	Kotabaru	Lowo Ndondo, Lowo Lande		
18	Detukeli	Lowo Laka, Lowo Pemoria		
19	Lepembusu Kelisoke	Lowo Lise, Lowo Pombo		
20	Detusoko	Lowo Ria	Mata Air Kena Fiko	PDAM Detusoko
21	Wewaria	Lowo Rea		

Sumber: Ende Dalam Angka 2021

6. Klimatologi

Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22,5–34°C, Curah hujan berkisar antara 0-549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,90 gr/m³, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7gr/m³ dan maksimum sebesar 89 gr/m³.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 dan hasil peninjauan kembali. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi: Kawasan Lindung seluas 77,669,33 ha (37,95%) dan Kawasan Budidaya seluas 126,990,72 ha (62,05%), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende

NO	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	%
I	Kawasan Lindung	77.669,33	37,95
1	Kawasan Hutan Lindung	31.689,95	15,48
	* Hutan Lindung	24.193,34	11,82
	* Cagar Alam	1.958,24	0,96
	* Taman Nasional	5.538,37	2,71
2	Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	33.295,46	16,27
	* Kawasan Resapan Air	26.236,67	12,82
	* Sempadan Pantai	1.971,28	0,96
	* Sempadan Sungai	4.484,47	2,19
	* Hutan Bakau (Mangrove)	603,04	0,29
3	Kawasan Perlindungan Setempat	12.683,92	6,20
	* Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	390,91	0,19
	* Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah	12.293,01	6,01
II	Kawasan Budidaya	126.990,72	62,05
1	Daerah Permukiman	12.935,72	6,32
2	Kawasan Kebun Campuran	14.365,98	7,02
3	Lahan Penggembalaan	9.279,23	4,53
4	Pertanian Lahan Basah	1.935,55	0,95
5	Pertanian Lahan Kering	38.236,64	18,68
6	Hutan Produksi		
	* Hutan Produksi	35.290,94	17,24
	* Hutan Produksi Terbatas	6.150,63	3,01
	* Hutan Produksi Konversi	1.186,03	0,58
7	Pertambangan	7.610	3,72
	TOTAL I+II	204,660,05	100

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Potensi Pengembangan Wilayah :

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan konsep struktur ruang wilayah dan konsep pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042. Konsep Pengembangan Wilayah di Kabupaten Ende menurut RTRW dimaksud, meliputi 5 (lima) Wilayah Pengembangan sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042



Sumber: RTRW Kab. Ende Tahun 2023-2042

A. Konsep Struktur Ruang Wilayah

Konsep pengembangan struktur ruang didasarkan pada data eksisting dan analisis yang telah dilakukan. Rencana pengembangan sistem pusat permukiman didasarkan pada kondisi eksisting, analisis dan kebijakan yang terkait di atasnya maka berdasarkan hasil analisis didapat:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan kewenangan pusat tetap berada di Perkotaan Ende.
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kewenangan Provinsi akan tetapi dalam perkembangannya pada Perda RTRW Provinsi tidak menyebutkan adanya PKL di Kabupaten Ende. Untuk itu pemerintah daerah merencanakan Perkotaan yang menjadi PKL, sebagai berikut:

- 1) Perkotaan Wolowaru;
- 2) Perkotaan Maurole;
- 3) Perkotaan Detusoko; dan
- 4) Perkotaan Nangapanda.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri atas:

- 1) Perkotaan Wolojita di Kecamatan Wolojita;
- 2) Perkotaan Welamosa di Kecamatan. Wewaria;
- 3) Perkotaan Ndonga di Kecamatan Ndonga;
- 4) Perkotaan Demulaka di Kecamatan Ndonga Timur;
- 5) Perkotaan Woloara di Kecamatan Kelimutu ; dan
- 6) Perkotaan Nangaba di Kecamatan Ende.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:

- 1) Perkotaan Maubasa di Kecamatan Ndori;
- 2) Perkotaan Maukaro di Kecamatan Maukaro;
- 3) Perkotaan Watuneso di Kecamatan Lio Timur;
- 4) Perkotaan Kotabaru di Kecamatan Kotabaru;
- 5) Perkotaan Watunggere di Kecamatan Detukeli;
- 6) Perkotaan Peibenga di Kecamatan Lempebusu Kelisoke; dan
- 7) Perkotaan Rendoraterua di Kecamatan Pulau Ende

Dengan adanya Sistem Permukiman di atas maka di Kabupaten Ende dapat dikembangkan 5 (lima) Wilayah Pengembangan, sebagai berikut:

a. Wilayah Pengembangan I

Wilayah Pengembangan ini, meliputi: Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur, dan Kecamatan Ende Utara dengan pusat WP di Kecamatan Ende Tengah, yang diarahkan kegiatan utamanya, sebagai berikut:

- 1) Pusat pemerintahan skala regional
- 2) Pusat perdagangan skala regional;
- 3) Pusat pendidikan skala regional;
- 4) Pusat kesehatan skala regional; dan
- 5) Pusat transportasi skala regional

Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dan gunung dengan wisata kuliner, yang akan dikembangkan menjadi ikon Pariwisata Perkotaan Ende.

b. Wilayah Pengembangan II

Wilayah Pengembangan ini, meliputi: Kecamatan Detusoko, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Ndonga Timur dan Kecamatan Ndonga dengan pusat WP di Kecamatan Detusoko, yang diarahkan kegiatan utamanya sebagai pusat kegiatan pariwisata, pertanian dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangannya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas Detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat Wolotopo dan Wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan pada wilayah ini dengan konsep agropolitan, adalah: sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri dan terdapat potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) di Mutubusa, Desa Sokoria, Kecamatan Ndonga Timur.

c. Wilayah Pengembangan III

Wilayah Pengembangan ini, meliputi: Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, dan Kecamatan Ndori dengan pusat WP di Kecamatan Wolowaru, yang diarahkan kegiatan utamanya yaitu pertanian, pariwisata, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, didukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan ekowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisional di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, kakao, dan tomat. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao.

d. Wilayah Pengembangan IV

Wilayah Pengembangan ini, meliputi: Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Pulau Ende dan Kecamatan Maukaro dengan pusat WP di Kecamatan Nagapanda, yang diarahkan pada pengembangan pariwisata, pertanian (perkebunan), pertambangan, perikanan dan transportasi. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.

e. Wilayah Pengembangan V

Wilayah Pengembangan ini, meliputi: Kecamatan Maurole, Wewaria dan Kecamatan Kota Baru dengan pusat WP di Kecamatan Maurole, yang diarahkan pada kegiatan pertambangan, perikanan, pertanian dan industri. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Enarara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores.

B. Konsep Pola Ruang Wilayah

Konsep pola ruang wilayah pada hakekatnya diarahkan sejalan dengan arahan kebijakan pembangunan maupun kebijakan tata ruang pada saat sekarang dan disesuaikan dengan hasil analisis ketersediaan tanah. Adapun beberapa konsep rencana pengembangan pola ruang wilayah, terdiri atas:

1. Untuk penentuan rencana kawasan lindung didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku baik itu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kawasan hutan lindung dan kawasan taman nasional maupun Surat Keputusan Gubernur atau Bupati terkait dengan kawasan cagar budaya atau hutan adat. Sedangkan untuk kawasan perlindungan setempat penetapan sempadan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi fisik yang ada.

Untuk penggambaran Kawasan perlindungan setempat, dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten.

2. Untuk pemenuhan rencana kawasan budidaya juga didasarkan pada atura-aturan yang berlaku dan dari hasil analisis ketersediaan tanah serta kebutuhan ruang untuk 20 tahun yang akan datang.

Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut di atas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung, meliputi:

a. Dalam skala wilayah Nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan:

- a) Pengembangan jalan Arteri Primer, meliputi: Ruas Aegela-Batas Kota Ende, Jalan Arah Bajawa, Jalan Perwira, Jalan Soekarno, Jalan Katerdal, Batas Kota Ende-Detusoko, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kesehatan;
- b) Pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan angkutan penyeberangan;
- c) Bandar udara pengumpul skala tersier meliputi Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende;
- d) Pengembangan pembangkit tenaga listrik;
- e) Pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, industri, perikanan, pertanian, panas bumi, pariwisata dan perkebunan; dan
- f) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Ende-Kelimutu.

b. Dalam skala regional Provinsi NTT, perkotaan ende masuk dalam sistem Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan fokus pengembangan:

- a) Perkotaan Ende masuk dalam sistem pusat kegiatan PKW;
- b) Pengembangan Terminal tipe B;
- c) Jaringan Transportasi Sungai, danau, dan penyebrangan meliputi: rencana pengembangan pelabuhan meliputi pelabuhan Ende dengan Lintas penyebrangan antar provinsi meliputi Ende-Surabaya;
- d) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi:
 - Pelabuhan pengumpul: Pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
 - Pelabuhan pengumpan: Pelabuhan Maurole di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.
- e) Rencana Sistem Transportasi Udara
 - Bandar udara pengumpul skala tersier meliputi Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende.
- f) Rencana Sistem Jaringan Energi
 - PLTB Sukoria di Kabupaten Ende dengan kapasitas 2x2,5 MW;
 - PLTU Ropa di Kabupaten Ende berkapasitas 2x7 MW;
 - Garduk Induk Ende di Kabupaten Ende dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - Gardu Induk Ropa di Kabupaten Ende dengan kapasitas 10 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan PLTP Sukoria ke Ropa di Kabupaten Ende, PLTU Ropa ke Incomer (Ende –Maumere), Ende –Maumere, Bajawa ke Ende.

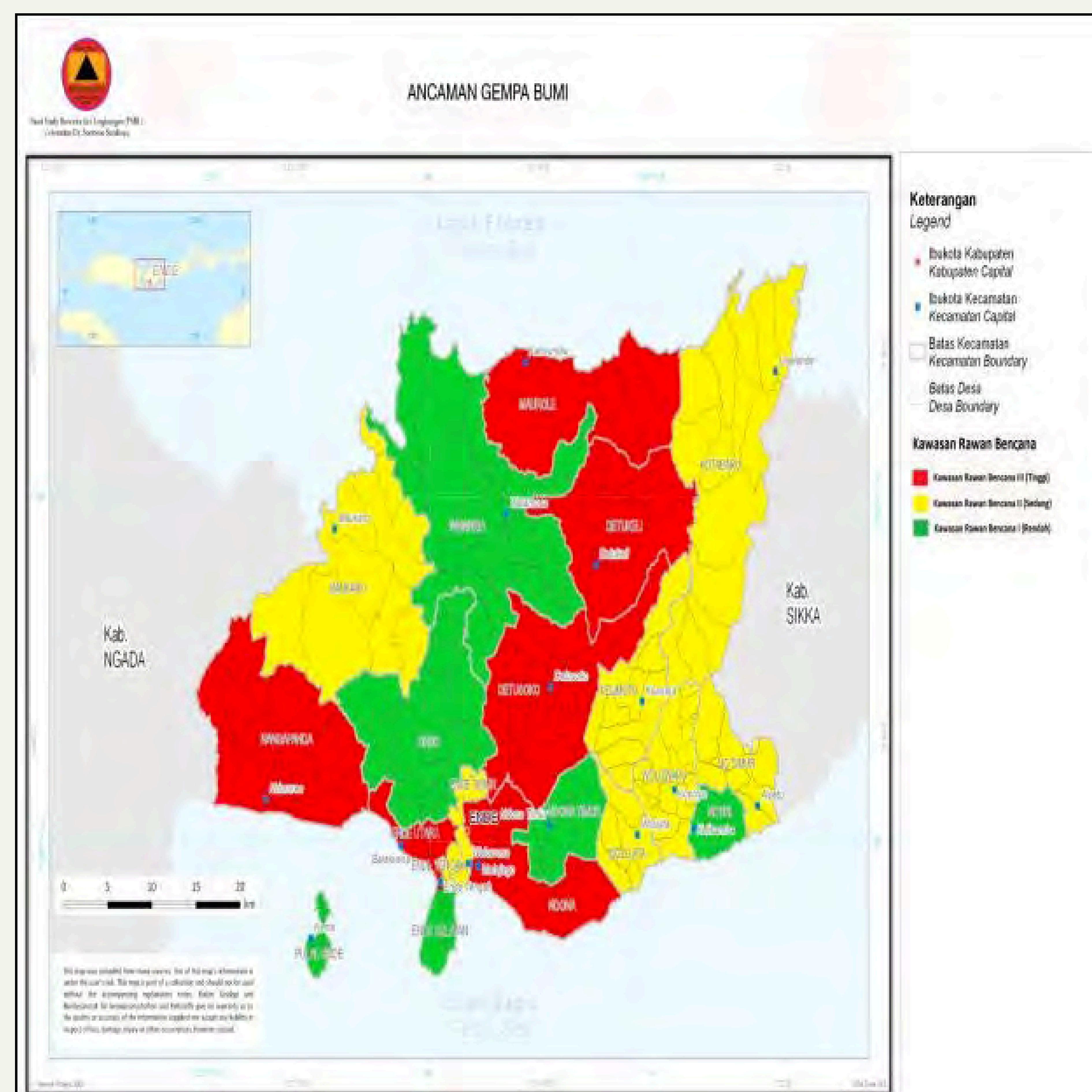
c. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru;

d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

Kawasan Rawan Bencana Alam

a) Gempa Bumi

Kabupaten Ende dikenal sebagai salahsatu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende mungkin diakibatkan oleh saling bergeseknya tepian zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale.



Tabel 2.10. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende

Zonasi	Wilayah Kecamatan	Gambaran Bahaya Gempa Bumi
Bahaya Gempa sangat Tinggi	Ende, Ndonga, Detusoko, Wewaria, Maurole dan Detukeli	Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan likuifaksi
Bahaya Gempa Tinggi	Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara	Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhnya batuan, jatuhnya bahan rombakan, luncuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi
Bahaya/kerentanan gempa Sedang	Maukaro, Ende, Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan Kotabaru	Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi
Bahaya Gempa Sedang-Rendah	Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndonga, Ndonga Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru	Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, gliciran rombakan)
Bahaya Gempa Rendah	Nangapanda, Maukaro, Ende, Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndonga, Ndonga Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru.	Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

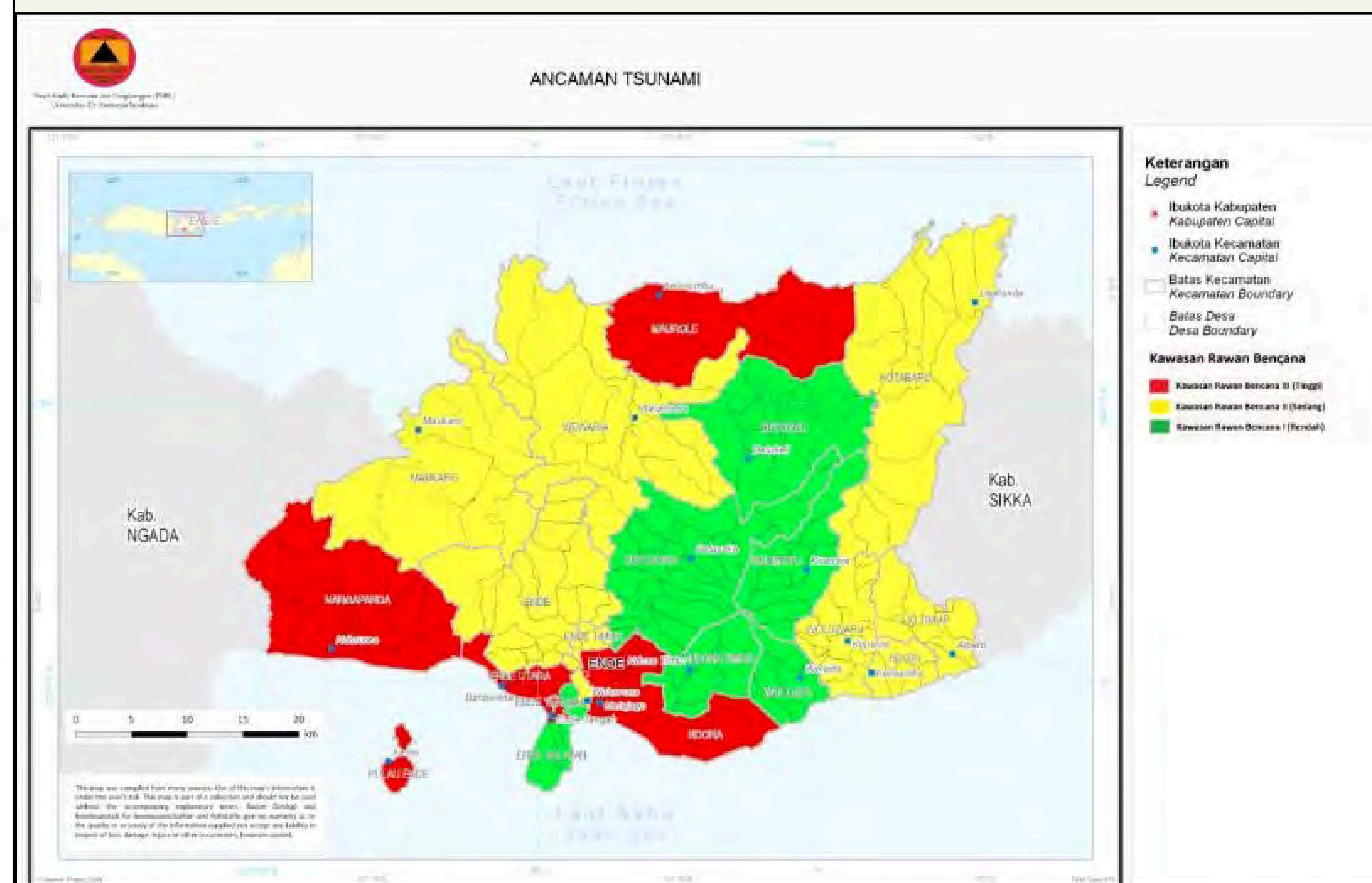
b) Tsunami dan Gelombang Pasang

Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gempa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain:

Tabel 2.11. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Nangapanda	Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa.
2	Pulau Ende	Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape
3	Ende	Desa Rukuramba
4	Ende Selatan	Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung
5	Ende Utara	Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma
6	Ende Timur	Kelurahan Mautapaga
7	Ndona	Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngilupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluoga
8	Wewaria	Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria
9	Maukaro	Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe
10	Maurole	Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu
11	Kotabaru	Desa Loboniki dan Desa Kotabaru
12	Wolowaru	Desa Mbuliwaralau
13	Lio Timur	Desa Hobatua
14	Ndori	Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031



c) Letusan Gunung Berapi

Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende, yaitu: Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita.

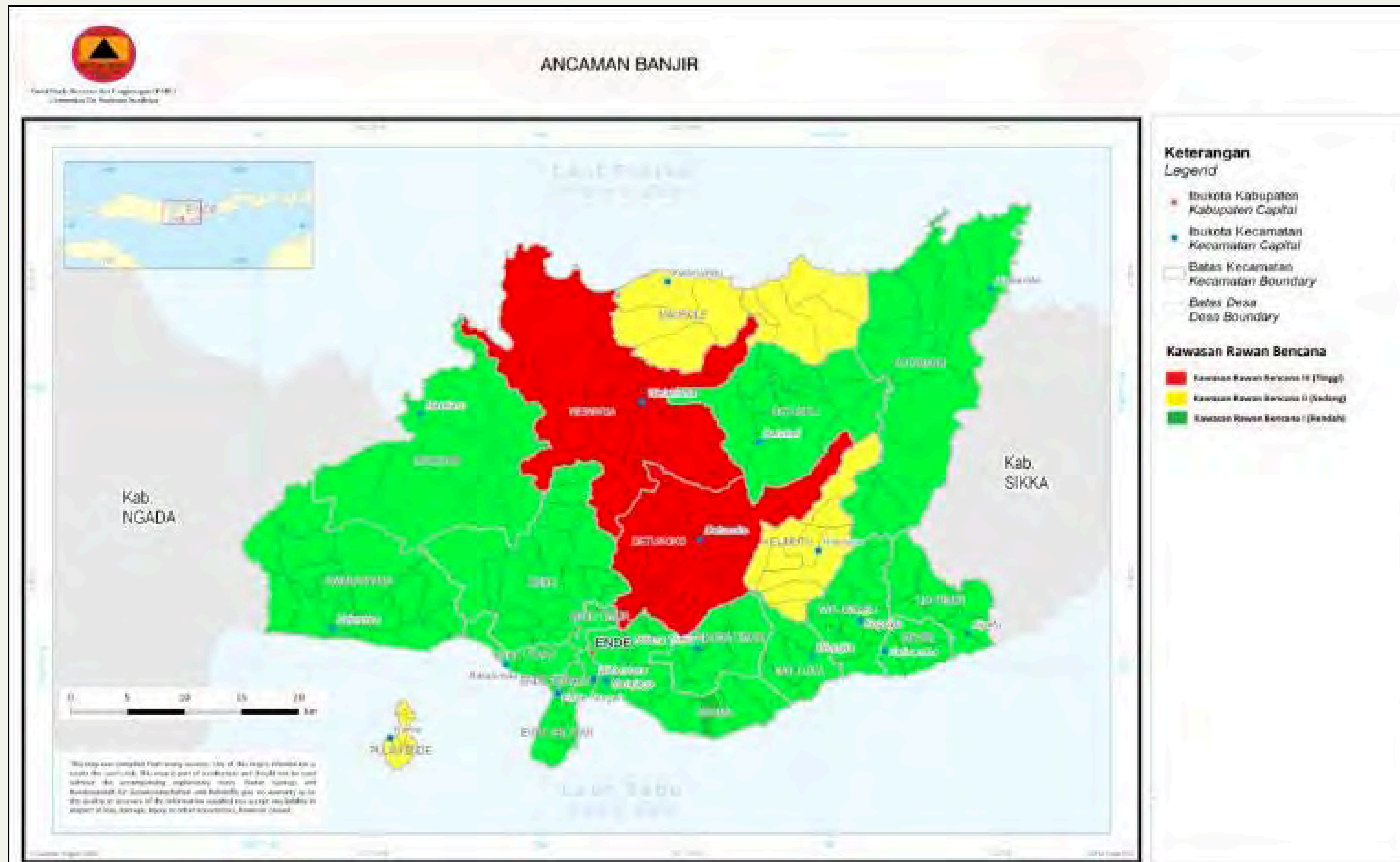


d) Debris Flow

Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, daerah yang sering mengalami adalah Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, Ende Timur, Ndonga, Detusoko, Wewaria, Maukaro, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Wolowaru, Kelimutu, Lio Timur, dan Ndori.

e) Banjir

Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama alir Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea.



f) Tanah Longsor

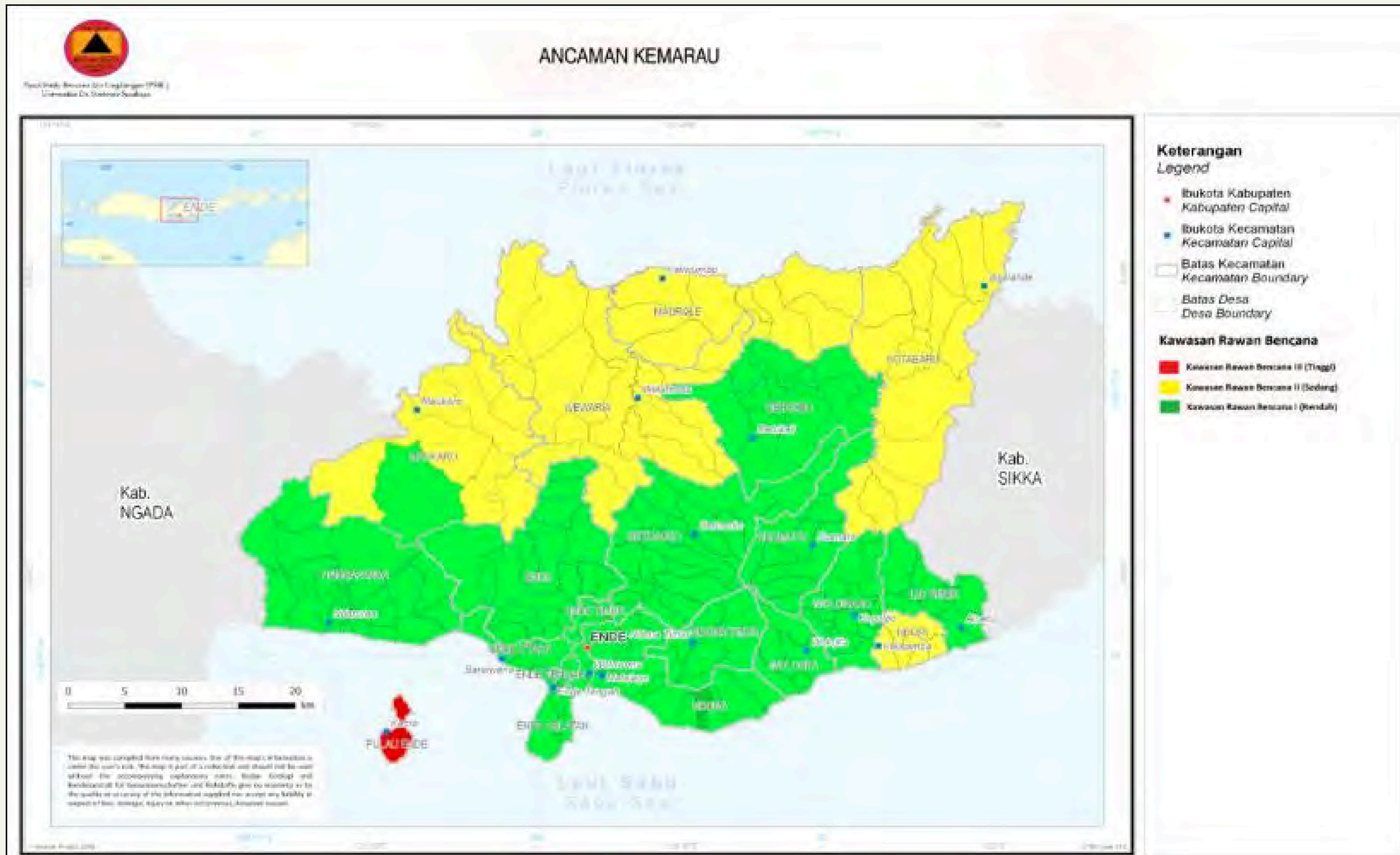
Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Daerah yang berpotensi adalah Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndonga, Ndonga Timur, Detusoko, Wewaria, Maukaro, Detukeli, Kotabaru Wolowaru, Kelimutu, Wolojita, Lio Timur dan Ndori.



Gambar 2. 5. Ancaman Tanah Longsor

g. Kekeringan

Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsiung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende Selatan, Ende Utara, dan Kecamatan Ende.



STANDAR KRITERIA PERENCANAAN

1 Standar Kebutuhan Air :

Menurut modul proyeksi kebutuhan air dan identifikasi pola fluktuasi pemakaian air, standar Kebutuhan air bersih ada dua macam yaitu:

Cara menentukan standar kebutuhan domestik adalah:

- **Jika tingkat konsumsi air eksisting lebih rendah dari acuan standar kebutuhan maka digunakan standar sesuai dengan ketepatan yang ada.**
- **Jika tingkat kebutuhan konsumsi air eksisting sama dengan atau lebih tinggi dari acuan standar kebutuhan, maka digunakan angka konsumsi air eksisting.**
- **Pada wilayah yang belum ada SPAM, digunakan standar kebutuhan air sesuai dengan ketepatan yang ada.**

Cara menentukan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut.

- **Standar kebutuhan non-domestik ditetapkan sebesar 15% dari kebutuhan domestik sesuai dengan Permen PU Nomor 18/2007 atau sesuai RSNO T-01-2003 butir 52 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing atau disesuaikan kebutuhan spesifik lokasi /daerah.**

Dalam rangka upaya perencanaan teknis jaringan air bersih pada suatu wilayah dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi

- Inventarisasi dan studi sumber air bersih baku yang ada dan merupakan potensi bagi kawasan / wilayah tersebut.**
- Kondisi jaringan distribusi yang ada saat ini (termasuk di dalamnya tingkat kebocoran dari sistem jaringan distribusi air bersih).**
- Menghitung tingkat kebutuhan air bersih dari proyeksi penduduk di lingkungan permukiman.**
- Studi kelayakan, yang merupakan kegiatan kajian kelayakan teknis, ekonomis, keuangan dan lingkungan bagi pengembangan sumber air baku maupun pengembangan sistem jaringan pendistribusian air bersih.**

Analisa penyediaan air bersih meliputi penggunaan air bersih oleh penduduk dengan sistem perpipaan dan non perpipaan :

- Sumber air baku**
- Kapasitas air baku**
- Kualitas air baku**
- Kuantitas air baku**
- Kontinuitas air baku**
- Sistem distribusi**
- Jumlah dan jenis sambungan**
- Jumlah penduduk terlayani**
- Tingkat pelayanan**

Data-data eksisting yang diperlukan untuk melakukan analisa penyediaan air bersih melalui sistem non perpipaan adalah :

- **Sumber air baku (sumur gali, air hujan, mata air, dsb)**
- **Unit-unit prasarana yang ada (pompa penampungan air)**
- **Kualitas air baku**
- **Kuantitas air baku**
- **Kontinuitas pelayanan**

Kebutuhan air dihitung berdasarkan proyeksi penduduk untuk 5 tahun mendatang dan kebutuhan rata-rata setiap pemakai setelah ditambahkan 20% sebagai faktor kehilangan air (kebocoran). Proyeksi kebutuhan air dipakai untuk menentukan:

- 1.Sumber air yang dapat memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan**
- 2.Kontinuitas**
- 3.Kapasitas IPA**
- 4.Kapasitas reservoir**
- 5.Diameter pipa transmisi dan distribusi**

Kebutuhan air ini didasarkan atas pelayanan dengan menggunakan sambungan domestik dan sambungan non domestik dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Hitung kebutuhan air

$$Q = P \times q$$

$$Q_{md} = Q \times f_{md}$$

Dengan pengertian :

Q_{md} = kebutuhan air (L/hari)

q = kebutuhan air per orang per hari (L/orang/hari)

P = jumlah jiwa yang akan dilayani sesuai dengan tahun [erencanaan (jiwa)

f_{md} = faktor maksimum (1,00 – 1,15)

2. Hitung kebutuhan total

$$Q_t = Q_{md} \times 100/80$$

Dengan perincian :

Q_t = kebutuhan air total dengan factor kehilangan 20% (L/hari)

Kebutuhan Domestik

Merupakan kebutuhan air yang berasal dari rumah tangga dan sosial. Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang. Standar konsumsi pemakaian air domestik dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Tingkat Konsumsi/Pemakaian Air Rumah Tangga Sesuai Kategori Kota

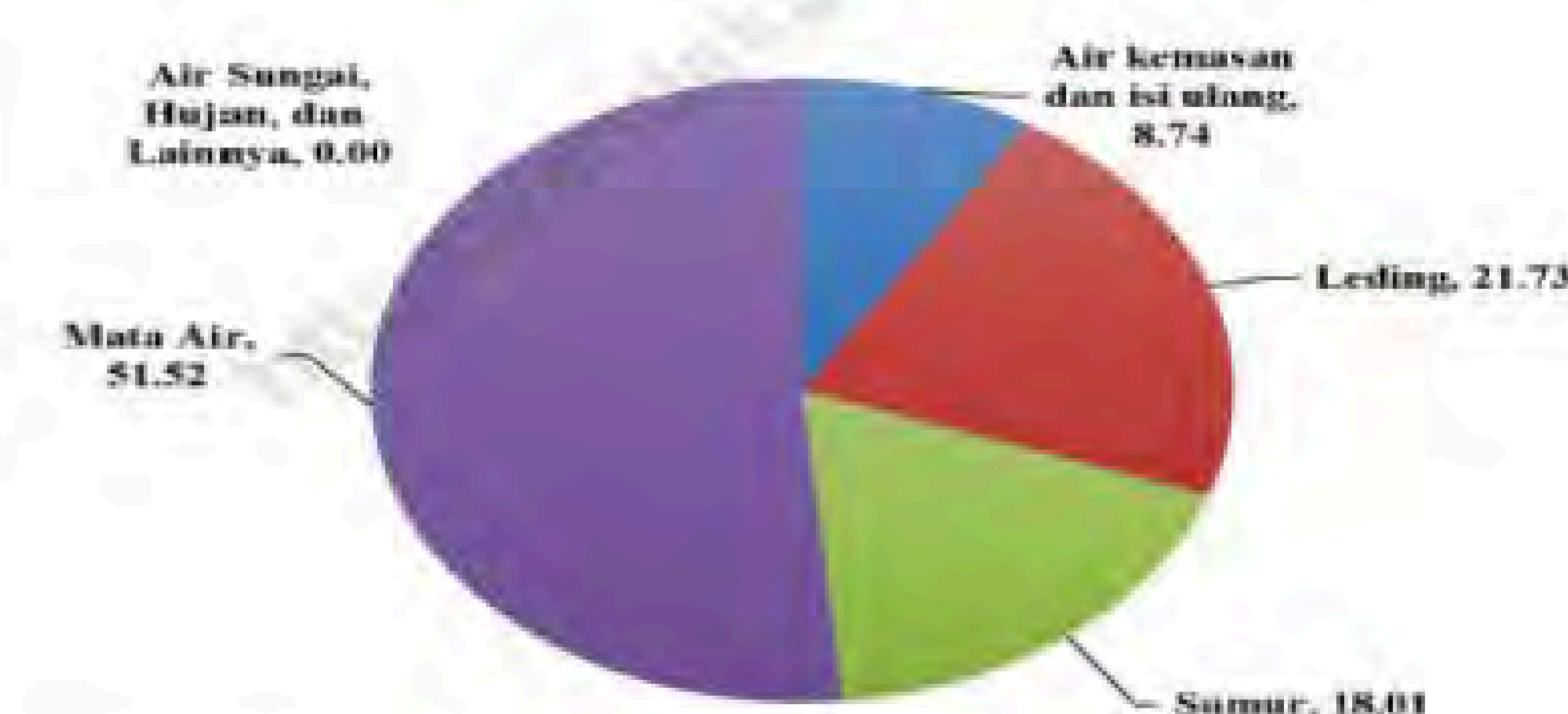
No.	Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Sistem	Tingkat Pemakaian Air
1.	Kota Metropolitan	>1.000.000	Non Standar	190
2.	Kota Besar	500.000 – 1.000.000	Non Standar	170
3.	Kota Sedang	100.000 – 500.000	Non Standar	150
4.	Kota Kecil	20.000 – 100.000	Standar BNA	130
5.	Kota kecamatan	<20.000	Standar IKK	100
6.	Kota Pusat Pertumbuhan	<3.000	Standar DPP	60

Sumber: SK-SNI 7831:2012 Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum

F. Air Bersih

Di antara sekian banyak jenis sumber air, mata air merupakan sumber air yang paling banyak digunakan sebagai air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Ende. Pada Tahun 2019, rumah tangga yang memenuhi keperluan air minumannya berasal dari sumber mata air sebanyak 51,52%, diikuti sumber leding 21,73%. Selain mata air, leding, sumur juga banyak digunakan di Kabupaten Ende sebanyak 18,01%, dan rumah tanggadengan penggunaan air kemasan dan isi ulang sebesar 8,74%.

Gambar 2.3 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Tahun 2019



Sumber data: BPS Ende, Inkesra Kab. Ende Tahun 2019

GAMBARAN UMUM AIR MINUM DAN SANITASI KOMUNITAS DI KABUPATEN ENDE

ANALISA KEBUTUHAN AIR MINUM RUMAH TANGGA

Data kebutuhan air keperluan rumah tangga meliputi jenis sumber utama air yang digunakan untuk seluruh keperluan rumah tangga termasuk minum dan memasak, jumlah pemakaian air per orang per hari, jenis sumber air minum, jarak dan waktu tempuh ke sumber air minum, kemudahan memperoleh air minum, orang yang biasa mengambil air minum dari sumbernya, cara pengolahan air minum dalam rumah tangga, cara penyimpanan air minum dan serta akses terhadap sumber air minum.

Pengelompokan jumlah pemakaian air untuk keperluan rumah tangga per orang per hari mengacu pada kriteria risiko kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan higiene yang digunakan World Health Organization (WHO). Jumlah pemakaian air per orang per hari adalah jumlah pemakaian air rumah tangga dalam sehari semalam dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Jumlah pemakaian air dikelompokkan menjadi beberapa kriteria :

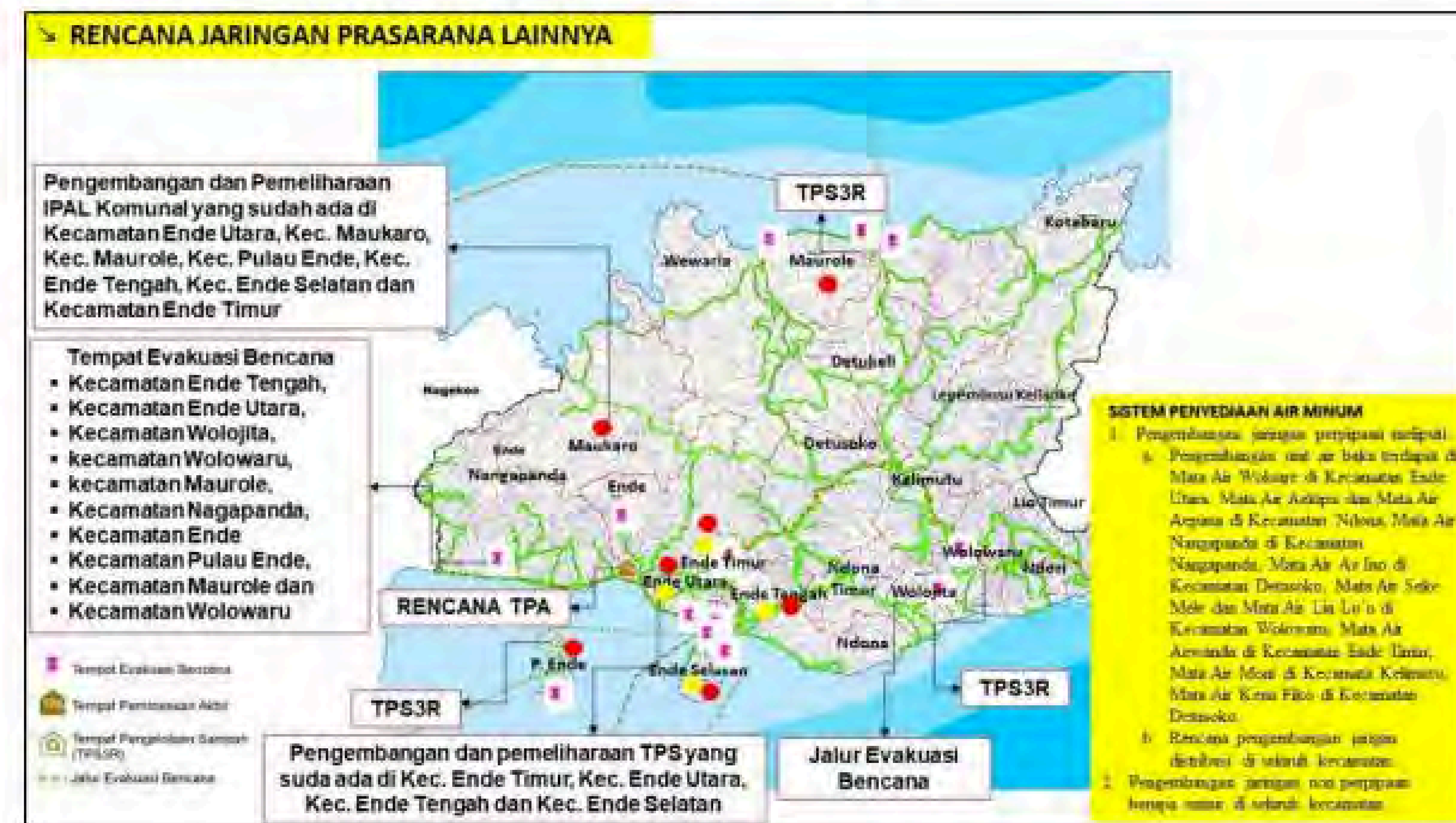
- Pemakaian air lebih kecil dari 5 liter/orang/hari, menunjukkan tidak akses
- Pemakaian air antara 5-19,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses kurang
- Pemakaian air antara 20-49,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses dasar
- Pemakaian air antara 50-99,9 liter/orang/hari, menunjukkan akses menengah
- Pemakaian air lebih besar atau sama dengan 100 liter/orang/hari, menunjukkan akses Optimal.

6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pembangunan jaringan prasarana lainnya yang menjadi prioritas untuk disediakan, antara lain:

- Pengembangan dan Pemeliharaan IPAL Komunal yang sudah ada di Kecamatan Ende Utara, Maukaro, Maurole, Pulau Ende, Ende Tengah, Ende Selatan dan Kecamatan Ende Timur;
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan membangun jaringan perpipaan dan pengembangan jaringan non perpipaan berupa sumur di semua Kecamatan;
- Pengembangan dan pemeliharaan TPS yang sudah ada di Kecamatan Ende Timur, Ende Utara, Ende Tengah dan Kecamatan Ende Selatan;
- Pembangunan TPA di Kecamatan Ende;
- Pembangunan TPS3R di Kecamatan Wolowaru, Maurole, Kecamatan Pulau Ende; dan
- Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana.

Gambar 2. 15. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



2.9. Kemitraan antara Pemerintah dengan BUMN/D, NGO dan Swasta

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ende membangun kemitraan dengan BUMN/D, Non Government Organisation (NGO) dan swasta.

Upaya membangun kemitraan ini dalam rangka mengatasi gap pendanaan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Ende dengan kapasitas fiskal yang terbatas, dan belum mampu untuk memenuhi pendanaan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan pelayanan publik, sehingga membutuhkan dukungan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten Ende.

Adapun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, tercatat sebanyak 12 (dua belas) Perusahaan/BUMN/Swasta, yang melaksanakan beberapa program dan kegiatan CSR pada beberapa wilayah di Kabupaten Ende, sebagai berikut:

1. PT. Pertamina
2. PT. PLN Pusat
3. PT. BRI TBK
4. Bank NTT Cabang Ende
5. PT. Pelindo
6. PT. BNI Cabang Ende
7. PT. Taspen Cabang Ende
8. Bank Mandiri Cabang Ende
9. PT. Nippon Paint Indonesia
10. PT. Pegadaian (Persero)
11. PT. Suzuki Ende
12. PT. Alfa Mart

Data rincian tentang BUMD yang mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 8. Capaian Kinerja Indikator Program TA 2020-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)		
		2020	2021	2022
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	-	33,19	44,28
2	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	38,66	39,30	53,73
3	Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	26,08	33,75	46,50
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	90,83	92,40	95,28
5	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	67,39	71,71	53,64
6	Prosentase Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku	-	104	96,54
7	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	36,08	36,08	1,40

SPAM EKSTING YANG DIKELOLA OLEH PERUMDA TIRTA KELIMUTU

NO	Nama SPAM	Sumber Air	Lokasi/ Wilayah Pelayanan	Reservoir	SR	Keberfungsian
1.	IKK Wolowaru	S. Lowo Moke	Kel. Bhokasape, Desa Lisedetu dan Desa Nakambara	100	327	Berfungsi
2.	IKK Maurole	MA. Ae Ino	Desa Maurole, Desa Mausambi, Desa Watukamba	100	359	Berfungsi
3.	IKK Detusoko	MA. Kena Fiko		N/a	93	Berfungsi Sebagian
4.	IKK Nangaba	S. Tiwu Kipi	Desa Borokanda, Desa Raterua, Desa Embu Ndoa, dan Desa Rukuramba	N/a	371	Berfungsi
5.	SPAM Moni	MA. Muruk eba	Desa Koanara, Desa Waturaka	100	47	Berfungsi Sebagian
6.	IKK Lio Timur	S. Fatamari	Desa Fatamari, Desa Woloaro (Dsn Detubelo), Kelurahan Watuneso, Desa Wolosambi, Desu Detu Pera.		325	Berfungsi
7.	IKK Nangapanda	Sumur Bor Ko'o Fai		100	719	Berfungsi
8.	SPAM P. Ende	Air Laut Sistem SWRO				
9.	SPAM Induk	Sungai Wolowona, Mata air Aepana, Mata Air Aekipa dan Mata Air Woloare	Kecamatan Ende Timur, Ende Selatan, Ende Tengah dan Ende Utara dan Ndonga		9,933	Berfungsi

SPAM LEMBAGA PENGELOLA NON PERUMDA

SPAM Non Perumda di Kabupaten Ende di kelola oleh POKMAS (Kelompok Masyarakat), yaitu KPSPAM, Komite Air dan BUMDES

Cakupan layanan penyediaan air non perumda pada tahun 2022 mencapai 22,924 KK, yang terbagi dalam :

1. Jaringan perpipaan 6.899 KK
2. Jaringan Non Perpipaan 12.970 KK
3. Pengambilan langsung ke sumber air 3.055 KK

Capaian Layanan air Limbah

2023

Anggaran		*Capaian Air Limbah (Akumulasi s.d 2023)	
Anggaran Air Limbah 2023	Persentase Anggaran Air Limbah Terhadap Total Belanja Daerah 2023 (%)	Layak (%)	Aman (%)
10.024.790.000,00	0,84%	72,11%	7,91%

target **2024**

Pagu Anggaran Air Limbah Tahun 2024	*Target Air Limbah Tahun 2024 (Akumulasi s.d 2024)	
	Layak (%)	Aman (%)
8.188.175.000,00	73,96%	8,62%

Tabel : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2013 s.d 2022

No	Jenis Prasarana	Nilai Kontrak (Rp)	JUMLAH DAK /TAHUN	Sumber Dana	Target Output		Target Outcome				Tahun
					JML/THN	Sat.	Kuant.	Sat.	Kuant.	Sat.	
1	MCK++	360.300.000	1.060.910.000	DAK	3	Unit	180	Jawa	32	KK	2013
2	MCK++	468.060.000	1.704.048.000	DAK	4	Unit	300	Jawa	60	KK	2014
3	MCK++	350.352.200	2.288.071.700	DAK	6	Unit	150	Jawa	30	KK	2015
4	Tangki Septik Komunal (10 - 20 KK)	94.012.000	2.405.572.800	DAK	13	Unit	50	Jawa	10	KK	2016
5	Tangki Septik Komunal (10 - 20 KK)	388.000.000	3.512.800.000	DAK	36	Unit	200	Jawa	40	KK	2017
6	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK)	504.000.000	4.872.000.000	DAK	58	Unit	300	Jawa	60	KK	2018
7	IPAL Komunal 50 SR	448.840.000	2.248.200.000	DAK	5	Unit	200	Jawa	50	KK	2018
8	MCK Kombinasi IPAL Komunal 25 SR	468.350.000	7.493.600.000	DAK	16	Unit	125	Jawa	25	KK	2018
9	Tangki Septik Individual (50 KK)	468.350.000	6.568.900.000	DAK	700	Unit	250	Jawa	50	KK	2018
10	MCK++	427.500.000	655.000.000	DAK	2	Unit	300	Jawa	60	KK	2018
11	Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T	141.075.000	428.450.000	DAK	62	SR	135	Jawa	27	KK	2019
12	MCK Kombinasi IPAL Komunal 25 SR	468.860.000	2.813.160.000	DAK	6	Unit	125	Jawa	25	KK	2019
13	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK)	280.000.000	1.000.000.000	DAK	20	Unit	175	Jawa	35	KK	2020
14	Tangki Septik Individual (50 KK)	200.000.000	3.065.000.000	DAK	613	Unit	250	Jawa	50	KK	2020
15	Tolot Individu + Tangki Septik Individu	350.000.000	3.500.000.000	APBN		Unit	130	Jawa	23	KK	2020
16	Tangki Septik Individual (50 KK)	350.000.000	5.621.000.000	DAK	800	Unit	250	Jawa	50	KK	2021
17	Tangki Septik Individual (50 KK)	371.728.000	5.190.916.000	DAK	782	Unit	280	Jawa	56	KK	2022
TOTAL			54.638.440.300		3.154		30.365	Jawa	6.014	KK	

1. Sanitasi Total berbasis Masyarakat di Kabupaten Ende - Dinas Kesehatan Kabupaten Ende

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemukiman. Program STBM memiliki indikator outcome dan indikator output. Adapun yang menjadi Indikator outcome.

STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output STBM adalah sebagai berikut :

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air sembarang tempat.
- b. Setiap rumah tangga harus menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dirumah tangga
- c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cucu tangan) sehingga semua orang cuci tangan dengan benar
- d. Setiap rumah tangga harus mengelolah sampahnya dengan benar
- e. Setiap rumah tangga harus mengelolah limbahnya dengan benar

Di kabupaten Ende pada tahun 2021 dari 279 jumlah desa dan kelurahan terdapat 219 Desa dan kelurahan yang sudah melaksanakan STBM atau 78,5% %. Sedangkan total desa STBM yaitu 99 desa jumlah ini tidak berubah dari tahun 2015. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dan Desa STBM dari tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan ini dapat dilihat pada gambar berikut. Desa/kelurahan yang dapat dikatakan STBM apabila sudah memenuhi salah satu pilar tersebut diatas yang dinyatakan dengan deklarasi oleh masyarakat dan ditanda tangani oleh camat/kepala wilayah administrative.

2. Tempat-tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Tempat-tempat umum adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan antara lain pasar rakyat, sekolah, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, hotel dan tempat-tempat umum lainnya. Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat-tempat umum yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan artinya memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna. Total TTU di tahun Tahun 2021 yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Ende sebanyak 631 atau 86,7% dari 728 total TTU yang ada.

Pencapaian ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada angka 100 % karena ada penambahan tempat-tempat umum (TTU) lainnya

3. Sarana Air Bersih :

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit. Berdasarkan data yang ada total jumlah sarana air minum yang memenuhi standar kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2021 sebesar 1.555 atau (50%) dari 3.113 sampel sarana air minum yang diambil. Dilihat dari jumlah yang ada masih belum optimalnya dalam menggalang kerjasama lintas sektor dan perilaku masyarakat yang masih kurang memperhatikan efisiensi dan aktifitas pemanfaatan air minum bersih.

4. Tempat Pengolah Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan :

Pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga perlu mendapat perhatian dari segi nilai gizi, segi kemurnian, maupun dari segi kebersihan. Sebab meskipun nilai gizi dan kemurnian baik namun kebersihan lingkungan tidak diawasi dan dipelihara, maka makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat kontaminasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan makanan antara lain persiapan tempat pengolahan seperti dapur yang harus memenuhi persyaratan, antara lain terdapat tempat pencucian peralatan; tempat penyimpanan bahan makanan; tempat persiapan; serta tempat pengolahan. Total TPM yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Ende sebanyak 199 dari 301 total TPM yang ada atau 66,1%. Pencapaian ini sangat menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada angka 100%. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya presentase laporan yang masuk dari puskesmas dan sebagian puskesmas mengalami peningkatan jumlah TPM yang belum memenuhi syarat kesehatan.

Sumber Data : RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ende 2023

Tabel 2. 88. Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar (80 %)						Batas waktu capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						Ket.
		Indikator	Target	Realisasi	%	% Penerima Layanan Dasar	%		Indikator	Target	Realisasi	%	% Mutu Layanan Dasar	% Pencapaian SPM	
1	2	3	4	5	6 = (4x5)	7= 6x80 %	8	9	10	11	12	13 = 12x20%	14 = 13+13	15	16
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	167	111	66,47	53,17%	1 tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	65,48%	65,48%	13,10%	66,27%	Setiap tahun	Tuntas Muda
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	1 tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	0	0	0	0	Setiap tahun	Belum Tuntas
Total Indeks Pencapaian SPM dan Kategori Pencapaian SPM													33,14%		Belum Tuntas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ende (DPRKPP)

Pelayanan pada urusan Perumahan Rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut :

1. Rasio Rumah Layak Huni.

Tahun 2021 terdapat 46.215 buah (71.51 %) rumah layak huni dari total 64.628 rumah di Kabupaten Ende.

2. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani.

Tahun 2021, belum dilakukan penanganan kawasan kumuh dikarenakan keterbatasan dana sehingga total kawasan kumuh tertangani masih sama dengan tahun sebelumnya yakni 14.11 Ha (11.92%).

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.

Pada Tahun 2021, rumah tinggal bersanitasi mengalami penambahan 803 rumah sehingga menjadi 32.636 buah (50.50%) dari total 64.628 rumah tinggal.

4. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai.

Tahun 2021, jumlah penduduk terlayani sistem air limbah memadai mengalami penambahan 3.212 jiwa menjadi 120.994 jiwa terlayani system air limbah memadai (43.72%) dari total jumlah seluruh penduduk 276.740 jiwa.

5. Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi.

%). Pada Tahun 2021 luas tanah pemda yang disertifikat mengalami penambahan sebesar 18.025 m² menjadi 1.977.376 m² (19.24 %) dari total luas bidang tanah sebesar 10.273.760 m².

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan pada urusan Perumahan Rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, sanitasi dan lingkungan serta air bersih. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut:

- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**
Pada Tahun 2022 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi sebesar 50,50% atau sebanyak 32.636 dari 64.628 rumah yang ada.
- Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni**
Pada Tahun 2022 Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni sebesar 10% atau sebanyak 6 KK yang direlokasi dari 60 KK korban Bencana Alam.
- Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani**
Pada tahun 2022 luas kawasan kumuh yang tertangani seluas 14,11 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 118,41 Ha, atau capaian kinerja sebesar 11,92%.
- Porsentase Meningkatnya Rumah Layak Huni**
Pada tahun 2022 jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 117.782 rumah dari total 270.207 rumah yang ada, capaian kinerja sebesar 43,59%.

Tabel 2. 9. Capaian Kinerja Indikator Program TA 2020-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)		
		2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	49,26	50,50	50,50
2	Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni	71,13	71,51	72,35
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani	11,92	11,92	11,92
4	Porsentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	-	-	43,59

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)			
		2019	2020	2021	2022
14	Persentase Balita Gizi Buruk	0,57	0,55	3,12	2,69
15	Prevalensi Balita Gizi Kurang	14,20	12,04	14,64	10,28
16	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta	42,04	14,80	15,21	5,72
17	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	19,59	17,40	14,33	8,93
18	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM	80,65	91,73	84,89	98,92
19	Meningkatnya Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat	46,08	61,50	88,78	85,71
20	Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman yang memenuhi syarat	100,00	88,51	77,50	100,00
21	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	89,93	84,23	80,75	86,38
22	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	1,89	17,75	9,18	31,36
25	Persentase Anak Usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak Rubella	77,60	51,43	53,22	95,30
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	39,82	78,98	21,83	1.643
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	100	26,34	0,278	2,08
28	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	0,008	0,00	0,00	10,00
29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	28,00	86,36	91,48	97,20
30	Cakupan Penemuan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	39,82	100,00	100,00	100,00
31	Angka Kejadian Malaria	0,01	0,0018	0,0011	0,0014
32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37,19	92,18	91,93	95,97
33	Cakupan penderita Diare Yang Ditangani	59,14	43,12	9,18	59,89
34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	52,42	68	100,00	100,00
35	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,018	0,129	7,51	0,15

 <p>Air</p>	 <p>Sanitasi</p>	 <p>Kebersihan</p>
<p>Pelayanan Tingkat Lanjut <i>Ditentukan tingkat Nasional</i></p>	<p>Pelayanan Tingkat Lanjut <i>Ditentukan tingkat Nasional</i></p>	<p>Pelayanan Tingkat Lanjut <i>Ditentukan tingkat Nasional</i></p>
<p>Pelayanan Dasar Air minum dari sumber yang layak dan tersedia di sekolah</p>	<p>Pelayanan Dasar Fasilitas yang layak, terpisah berdasarkan jenis kelamin dan dapat digunakan di sekolah</p>	<p>Pelayanan Dasar Sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) lengkap dengan air yang mengalir dan sabun</p>
<p>Pelayanan Terbatas Ada sumber air layak (air perpipaan, sumur/mata air terlindungi, penampungan air hujan, air dalam kemasan), namun air tidak tersedia saat survei</p>	<p>Pelayanan Terbatas Ada sarana sanitasi yang layak (WC sentor cubluk dengan tutup, jamban komposting), namun tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat dipergunakan</p>	<p>Pelayanan Terbatas Sarana cuci tangan dengan air namun tidak tersedia sabun</p>
<p>Tidak Tersedia Tidak ada sumber air atau sumber air tidak layak (sumur/mata air tidak terlindungi, air tangka dan sumber air permukaan)</p>	<p>Tidak Tersedia Tidak ada jamban atau jamban tidak layak (cubluk tanpa penutup, jamban menggantung dan buang air di sembarang tempat)</p>	<p>Tidak Tersedia Tidak ada sarana cuci tangan di sekolah, atau ada sarana cuci tangan tapi tidak tersedia air</p>

Gambar 1.3 Operasional Indikator Sanitasi Sekolah dalam SDGs

Peta Sarana Pendidikan Kabupaten Ende

Untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Ende mencakup TK, SD, SMP, SMA/K. Fasilitas pendidik jenjang Sekolah Dasar tersebar merata di semua Kecamatan, begitu juga dengan pendidikan menengah pertama tersebar merata, baik itu dengan status sekolah Negeri maupun Swasta. Sedangkan sekolah tingkat atas di beberapa kecamatan tidak terdapat fasilitas pendidikan tersebut. Jumlah fasilitas pendidikan Sekolah Dasar terbanyak berada di Kecamatan Nangapanda dengan jumlah 25 unit terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Untuk Sekolah Menengah Pertama terbanyak berada di Kecamatan Nangapanda dan untuk Sekolah Menengah Atas terbanyak berada di Kecamatan Nangapanda dengan jumlah 3 unit. Untuk lebih jelasnya tentang persebaran fasilitas pendidikan perkecamatan di kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel Jumlah Pendidikan di Kabupaten Ende Tahun 2021 peta persebaran sarana pendidikan Kabupaten Ende.



PENTINGNYA SARANA AIR, SANITASI DAN HYGIENE DI LAYANAN KESEHATAN

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti Puskesmas, Pustu dll memiliki peranan penting untuk masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Namun, tidak dapat dihindari bahwa fasyankes juga memiliki potensi sebagai sumber infeksi dan penyebaran penyakit pada masyarakat jika tidak dilengkapi dengan sarana Air, Sanitasi, dan Higiene yang layak. Tidak tersedianya sarana Air, Sanitasi, dan Higiene yang layak di fasyankes seringkali dihubungkan dengan penyebaran healthcare associated infections (HAIs).

Ketersediaan sarana air, sanitasi dan kebersihan atau dikenal secara global dengan istilah Water, Sanitation, Hygiene (WASH) merupakan aspek pendukung utama dari pelayanan kesehatan yaitu aspek kualitas, keadilan dan martabat bagi semua orang. Sarana sumber air dan sanitasi yang layak, sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengolahan limbah medis, pengelolaan kebersihan, merupakan sarana-sarana yang penting dan harus tersedia di Puskesmas untuk menghindari berbagai penyakit termasuk Covid-19 yang telah menjadi pandemi saat ini.

Tabel 2. 84. Hasil Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar (80%)					Batas waktu capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					% Pencapaian SPM	Batas waktu capaian	Ket.
		Indikator	Target	Realisasi	%	% Penerima Layanan Dasar		Indikator	Target	Realisasi	%	% Mutu Layanan Dasar			
1	2	3	4	5	6 = (4x5)	7 = 6x80%	8	9	10	11	12	13 = 12x20%	14 = 7+13	15	16
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	35.044	17.760	5,92%	9,54%	thn	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	5,92%	5,92	1,38	5,92%	Setiap tahun	Tuntas Madya
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	35.044	9.588	7,04%	1,63%	thn	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	7,04%	7,04	1,41	7,04%	Setiap tahun	Tuntas Pratama
Total Indeks Pencapaian SPM dan Kategori Pencapaian SPM													81,98%		Tuntas Madya

Indeks Pencapaian SPM yang diperoleh dalam bidang urusan Pekerjaan Umum sebesar **81,98%**, maka kategori pencapaian SPM adalah **Tuntas Madya**.

Peta Sarana Kesehatan Kabupaten Ende

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Ende terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik serta apotik. Rumah sakit hanya terdapat di Kecamatan Ende Tengah dan Wolowaru masing-masing 1 unit. Puskesmas tidak terdapat di kecamatan Wewaria, puskesmas pembantu tidak terdapat di beberapa kecamatan seperti Ende Timur dan Ende Tengah. Untuk poliklinik hanya terdapat di beberapa kecamatan seperti Ende Timur, Ende Tengah, Ndonga, Kelimutu, Kotabaru, Detusoko dan Wewaria. Apotik terdapat di Kecamatan Nangapanda, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara, Detusoko dan Wewaria. Untuk lebih jelasnya tentang penyebaran fasilitas kesehatan perkecamatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten ende Tahun 2021 dan peta persebaran sarana kesehatan Kabupaten Ende.



Tabel 2. 64. Pencapaian Target SDGs 6 di Kabupaten Ende Tahun 2020/2022

Tujuan/Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	INDIKATOR KABUPATEN	KONDISI TAHUN 2020	KONDISI TAHUN 2021	KONDISI TAHUN 2022	SUMBER DATA	TARGET SDGS 2030	Instansi Pelaksana
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua							
6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	90,83 %	93,20 %	95,82 %	LKPJ	6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	DINAS PUPR
6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat	44,20 %	44,20 %	85,71 %	LKPJ		DINKES
6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	90,83 %	93,20 %	95,82 %	LKPJ		DINAS PUPR
6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan	Cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS	27,15 %	27,15 %	38,17 %	LKPJ		6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan
	Persentase Desa yang Melaksanakan STBM	67,63 %	87,77 %	99,28 %	LKPJ	DINKES	
	Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman	100 %	100 %	93,18 %	LKPJ	DINKES	

Analisis Kebutuhan Investasi Air Minum dan Sanitasi PADA KOMUNITAS

POKJA PKP KABUPATEN ENDE 2021

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2020)	Kondisi 2024 (jiwa)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang(Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024
Jumlah penduduk	270.763	274.793	4.030		
- Perkotaan	87.269	88.568	1.299		
- Perdesaan	183.494	186.225	2.731		
Jumlah penduduk yang dilayani Air Minum	252.513				
- Perkotaan	79.258	88.568	9.310	700.000	6.517.042.962
- Perdesaan	173.255	186.225	12.970	560.000	7.263.080.053
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	93,05	100	6,95		
- Perkotaan	90,82	100	9,18		
- Perdesaan	94,42	100	5,58		
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
A. PDAM					
B. Berbasis masyarakat					
Total kebutuhan					13.780.123.015

POKJA PKP KABUPATEN ENDE 2021

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi SANITASI

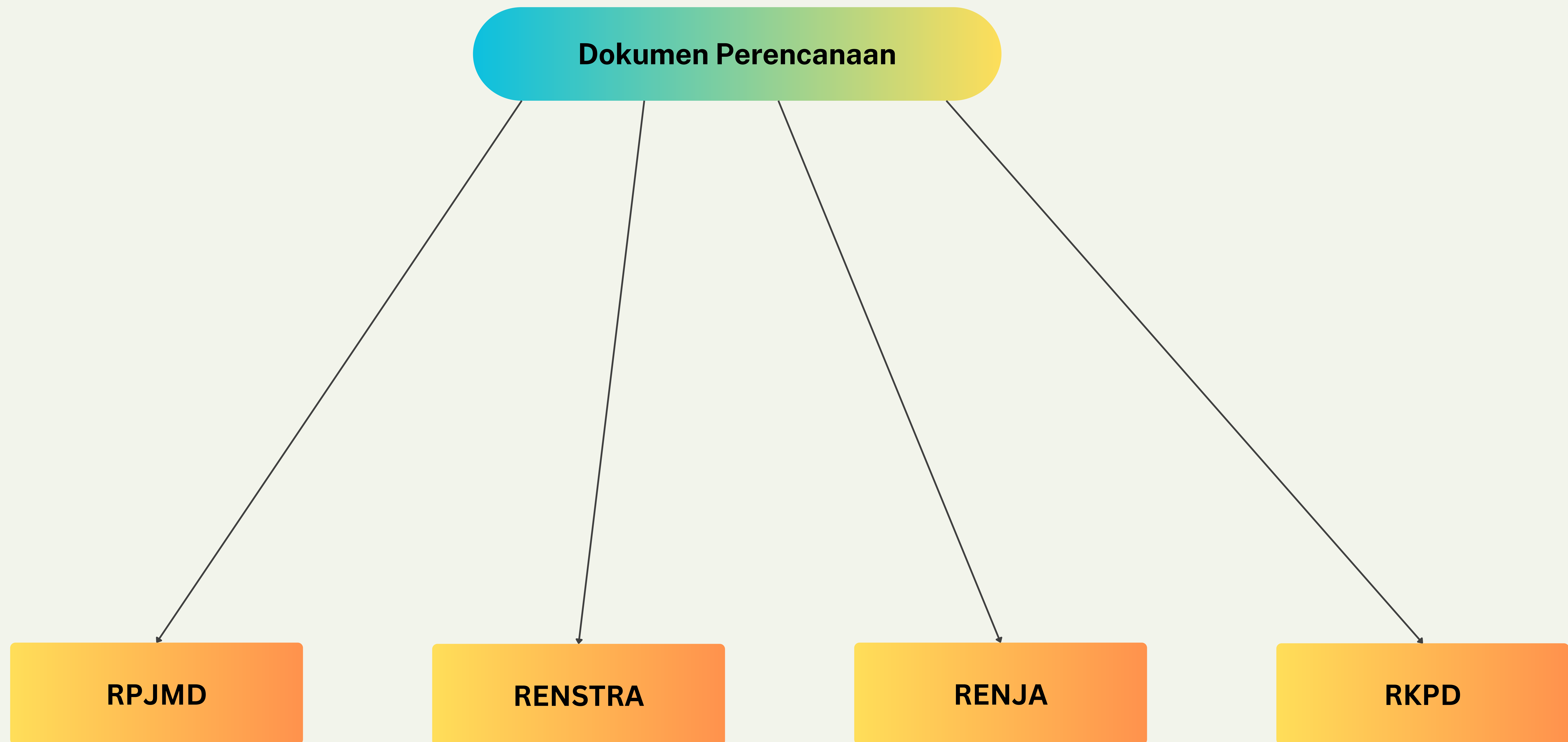
Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2020)	Kondisi 2024 (jiwa)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang(Rp)	Kebutuhan investasi sd 2023
Jumlah penduduk	270.763	274.793	4.030		
- Perkotaan	87.269	88.568	1.299		
- Perdesaan	183.494	186.225	2.731		
Jumlah penduduk dengan saptik tank tertutup	239.896	274.793	34.897		
- Perkotaan					
- Perdesaan					
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	88,6	100	11,40		
Jumlah Rumah tangga Kabupaten	61.838	62.758	920		
Cakupan rumah tangga yang dilayani (tabel II.4)	54.788	62.758	7.970	6.500.000	51.803.871.041
jumlah rumah tangga yang belum terlayani	7.050	7.970	920		
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
Total kebutuhan					51.803.871.041

PERHITUNGAN GAP KEBUTUHAN ANGGARAN AIR DAN SANITASI :

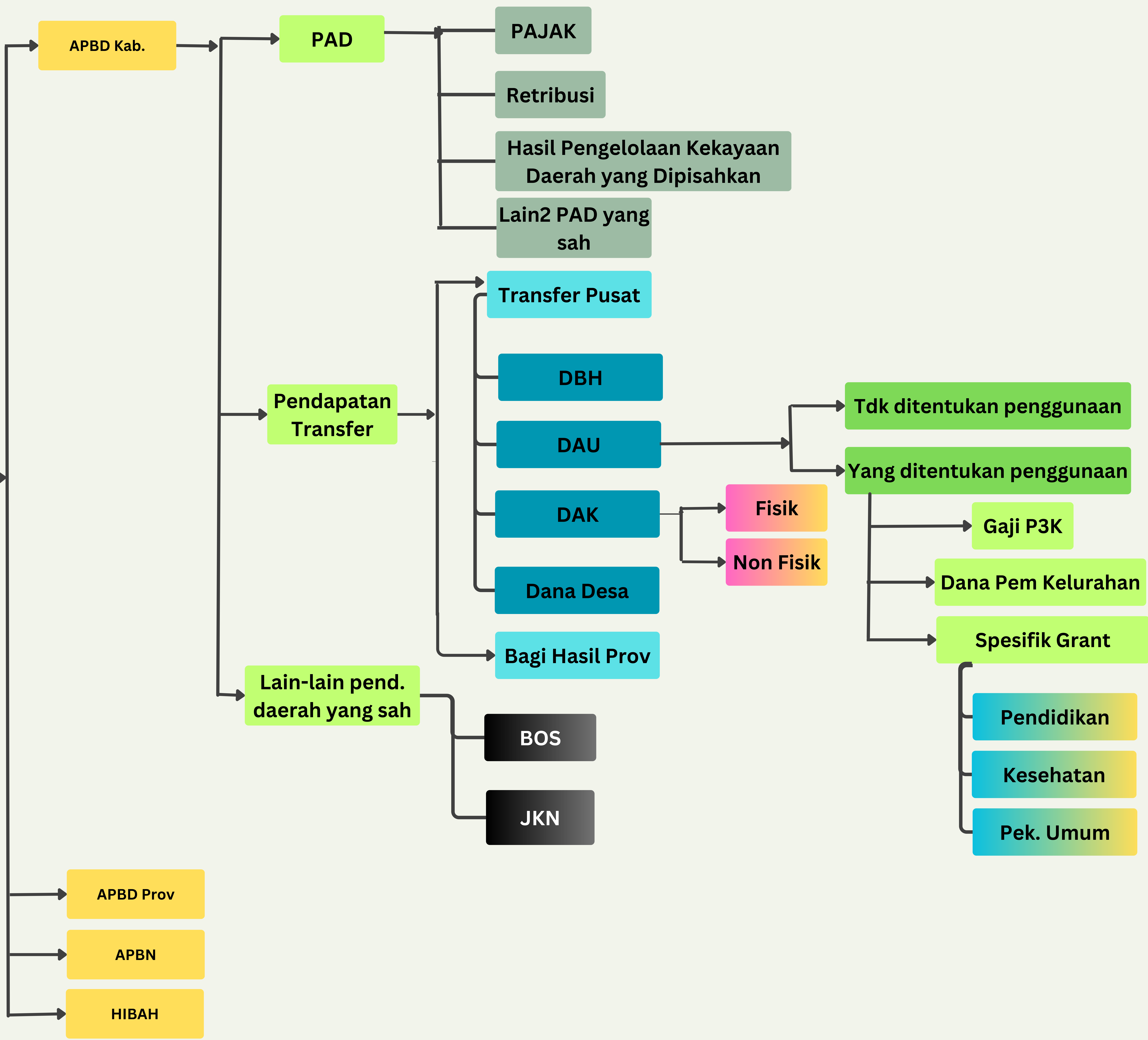
Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan untuk anggaran air dan sanitasi di Kabupaten Ende maka diperlukan sebuah analisa dan perhitungan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran agar membantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan OPD dan pemerintah desa. Proses perencanaan pasti akan menggunakan data kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan anggaran sehingga dapat menemukan gap anggaran. Terlampir adalah analisa gap anggaran sesuai dengan dokumen RAD APMPL Kabupaten Ende tahun 2022-2024

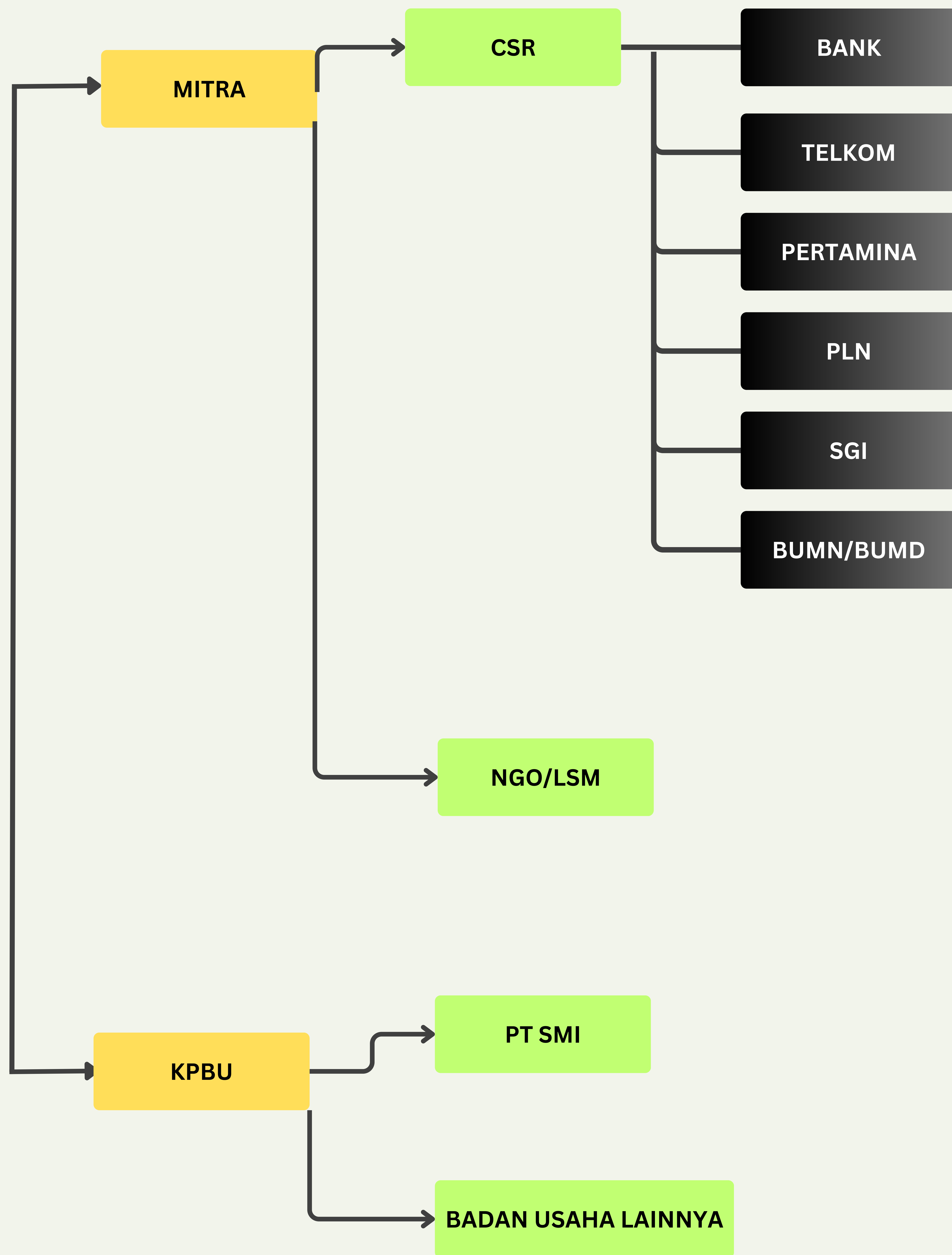
	Kebutuhan (Perhitungan RAD AMPL)	Kemampuan (Perhitungan RPJMD)
Air Minum	Rp. 13.780.000.000	Rp. 6.800.000.000 (49,35%) 1 program di PUPR
Sanitasi	Rp. 51.604.000.000	Rp. 31.843.500.000 (61,46%) 2 program di DPRKPP
GAP		TARGET AKSES (RAD AMPL)
Air Minum	Rp. 6.980.000.000 (50,65%)	98,66%
Sanitasi	Rp.19.960.500.000 (38,54%)	100%

ALUR DAN STRUKTUR PERENCANAAN DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE



**Penganggaran/
Sumber
Penganggaran**





Dokumen Perencanaan

APBN

USULAN DAERAH
MELALUI APLIKASI
SIPPA

DED

RAB

RC

VALIDASI BALAI WIL
PROV NTT

KOMPILASI

VALIDASI

VALIDASI BALAI WIL
PROV NTT

PERSETUJUAN PUSAT

ALOKASI

PELAKSANAAN

APBD PROV

RPIJM

Top Down OPD Provinsi

DAU

Rencana Top Down OPD
Kabupaten

Usulan Desa / Kelurahan

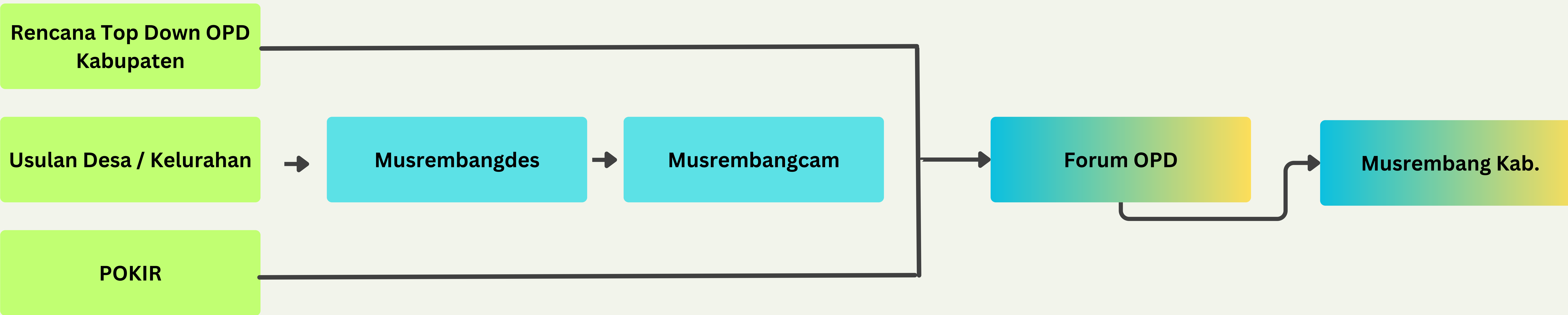
Musrembangdes

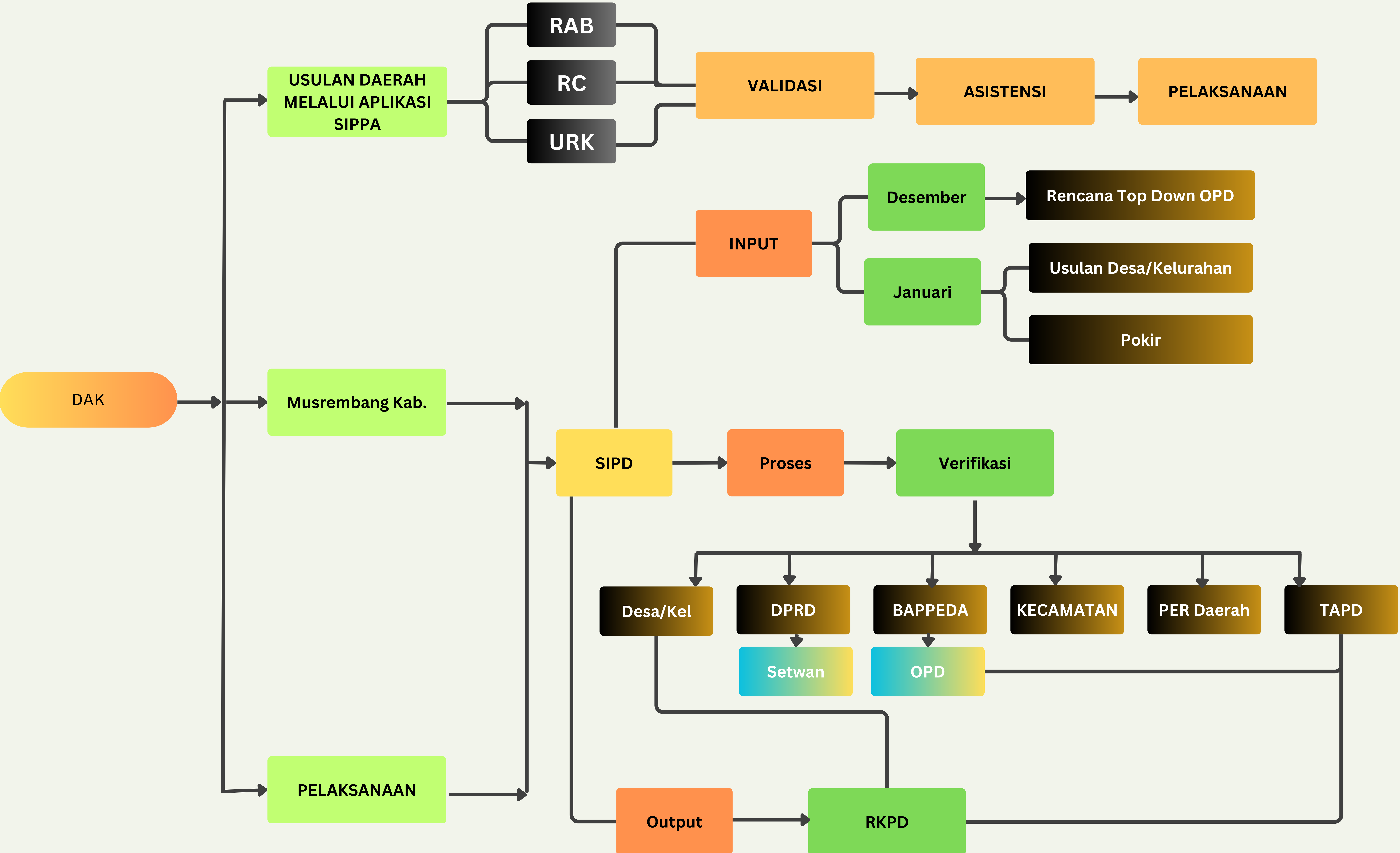
Musrembangcam

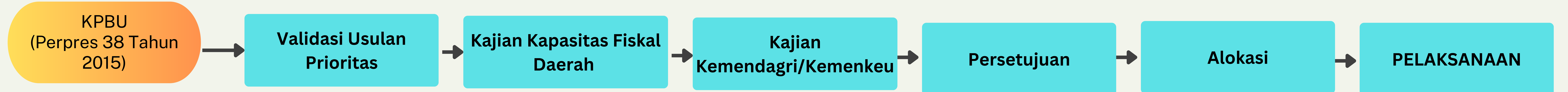
POKIR

Forum OPD

Musrembang Kab.







Skenario Pencapaian Sasaran Sanitasi

Sesuai dengan hasil analisa instrumen perencanaan sanitasi, skenario pencapaian sasaran sanitasi di Kabupaten Ende tidak beda jauh dengan tahapan pengembangan sanitasi yang dijelaskan sebelumnya. Namun untuk skenario ini adalah rencana peningkatan akses dalam jangka menengah selama 5 tahun. Skenario pencapaian ini lebih detail menjelaskan tahapan pengembangan setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk mencapai target universal akses Skenario pencapaian sasaran sanitasi ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel : Skenario Pencapaian Sasaran

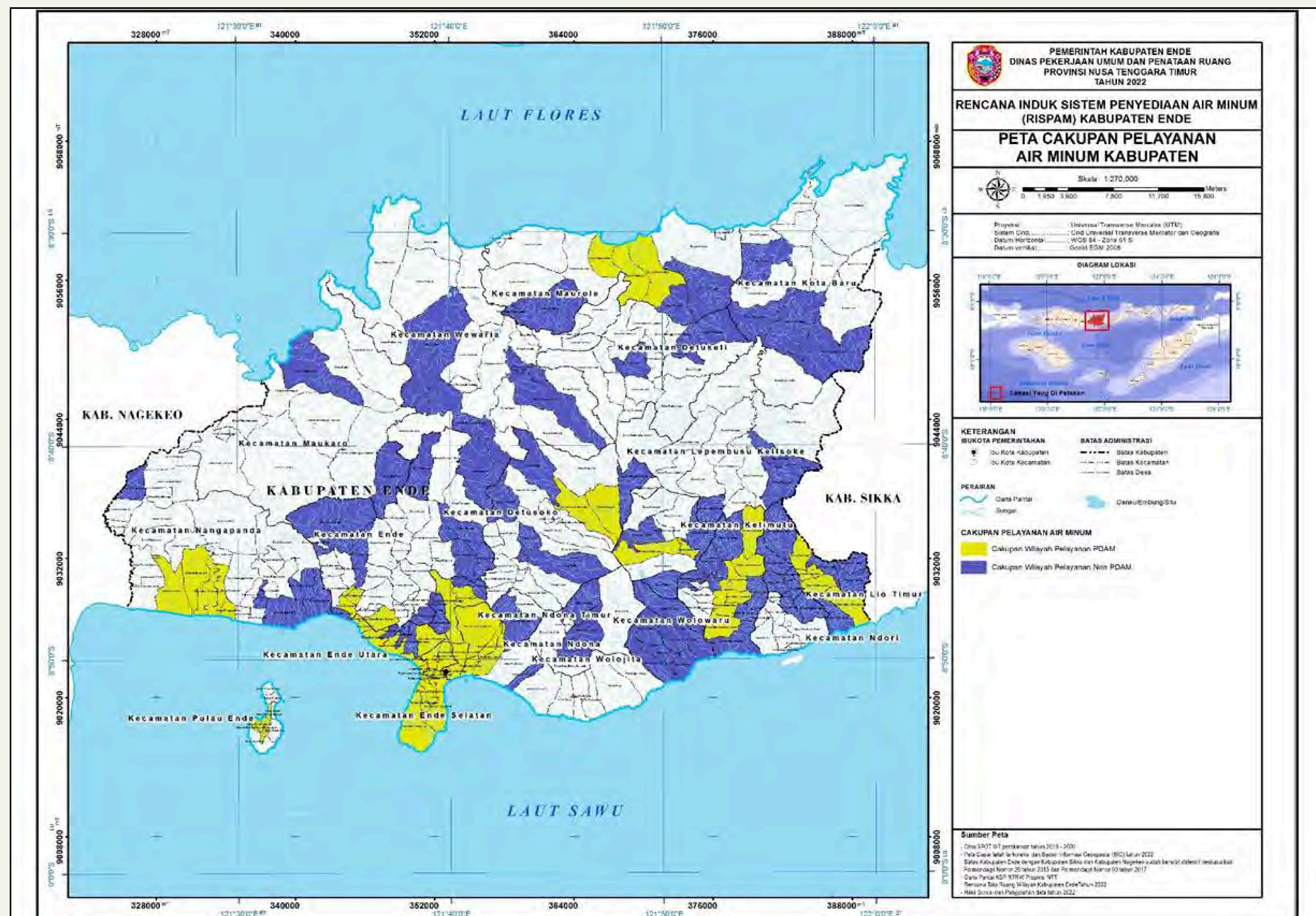
Komponen	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Air Limbah Domestik											
Akses Layak ⁽¹⁾	33	36	41	48	54	58,39	85	86	87	88	90,27
Akses Dasar ⁽²⁾	19	24	21	16	16	16,25	12	11	10,4	10	9,73
Tanpa Akses ⁽³⁾	48	40	38	36	30	25,37	0	0	0	0	0
Persampahan											
Penanganan ⁽⁴⁾	12	14	16	18	20	16,72	23	26	30	40	50,17
Penanganan Rumah Tangga ⁽⁵⁾	0	0	0	1	3	4,6	57	54	48	35	22,83
Pengurangan ⁽⁶⁾	0	0	0	0	0	0,57	10	20	22	25	27
Tidak Tertangani ⁽⁷⁾	88	86	84	81	77	78,12	10	0	0	0	0
Drainase Perkotaan											
Luas Genangan (ha)	25,57	20,35	18	16,5	15,8	15,4	5	0	0	0	0

Sumber: instrumen SSK dan hasil analisa Pokja AMPL

Skenario pencapaian sasaran merupakan skenario pencapaian sasaran sanitasi kabupaten Ende 5 tahun ke depan. Untuk skenario air limbah domestik yaitu meningkatnya aksesnya layak secara bertahap dari 58,39 % akses layak menjadi 85 % pada tahun 2019 dan 90,27% pada akhir tahun 2023. Akses dasar dari 16,25% pada tahun 2018 menjadi 12 % pada tahun 2019 dan 9,73% pada akhir tahun 2023. Sedangkan tanpa akses atau BABS 25,37% pada tahun 2018 menjadi 0% pada tahun 2019. Sub sektor persampahan kondisi eksisting penanganan sampah ke TPA baru mencapai 16,72% ditargetkan tahun 2020 penanganan ke TPA dari 26 %, jangka menengah tahun 2023 sebesar 50,17 % dan pengurangan dari 0,57% pada tahun 2018 menjadi 27% pada akhir tahun 2023.

Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Ende

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat Kabupaten Ende memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih dengan sistem perpipaan diperoleh dari Perumda Tirta Kelimutu dan swadaya masyarakat. Hingga saat ini tingkat pelayanan air bersih di Kabupaten Ende mencapai 54,74% dari seluruh penduduk Kabupaten Ende. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende, 10 Kecamatan telah mendapat pelayanan air bersih secara perpipaan yang dikelola Perumda Tirta Kelimutu Kabupaten Ende. Jumlah sambungan rumah terlayani oleh jaringan pipa air bersih dari Perumda Tirta Kelimutu mencapai 12.174 SR. Sedangkan pelayanan air minum oleh POKMAS mencapai 22.924 SR Pelayanan air bersih secara perpipaan masih diprioritaskan pada pusat kecamatan dan pusat permukiman, sedangkan pada beberapa wilayah permukiman pedesaan yang jauh, penyediaan air bersih non perpipaan lebih mendominasi dengan menggunakan sumur bor/ sumur gali dan mata air terdekat, sungai, embung maupun mobil tangki sebagai sumber penyediaan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit air secara geografis dan demografis. Berikut Peta cakupan pelayanan:



**BUDGET EXISTING PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM AIR DAN SANITASI DI LAYAKAN
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DARI RENJA DAN RKA**

3 Setting WASH	TAHUN ANGGARAN			TOTAL
	2021	2022	2023	
Komunitas	13.124.779.530	9.244.930.018	18.623.640.000	40.993.349.548
Sarana Kesehatan	1.326.600.000	1.224.000.000	2.956.300.000	5.506.900.000
Sarana Pendidikan	2.836.304.807	2.530.300.000	6.031.581.000	11.398.185.807
TOTAL				57.898.435.355
RKA/PELAKSANAAN				
3 Setting WASH	TAHUN ANGGARAN			TOTAL
	2021	2022	2023	
Komunitas	13.770.777.799	10.607.067.980	18.380.640.000	42.758.485.779
Sarana Kesehatan	935.259.152	193.210.102	410.299.000	1.538.768.254
Sarana Pendidikan	3.872.015.809	1.388.527.508	4.268.130.000	9.528.673.317
TOTAL				53.825.927.350

Eksisting anggaran air dan sanitasi diambil dari dokumen RKA dan Renja OPD untuk memotret 3 setting target air minum dan sanitasi yakni di komunitas, sarana kesehatan dan sarana pendidikan Tahun Anggaran 2021-2023 yang diambil dari SIPD RI. Tujuan untuk melihat kembali eksisting anggaran air dan sanitasi adalah untuk melihat Perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar bisa mendapatkan gap atau selisih anggaran. Ketika gab anggaran air dan sanitasi sudah dikemukakan agar pemerintah dapat menyiapkan alternatif pendanaan lain untuk menutup gap ini.

Estimasi Kebutuhan, Kemampuan Anggaran WASH dan Gab

Estimated water and sanitation budget needs for Ende Regency in 3 sectors

3 setting WASH	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Komunitas	20,486,004,000	22,534,604,400	24,788,064,840	27,266,871,324	29,993,558,456	32,992,914,302	36,292,205,732	194,354,223,055
Sarana Kesehatan	3,251,930,000	3,577,123,000	3,934,835,300	4,328,318,830	4,761,150,713	5,237,265,784	5,760,992,363	30,851,615,990
Sarana Pendidikan	6,634,739,100	7,298,213,010	8,028,034,311	8,830,837,742	9,713,921,516	10,685,313,668	11,753,845,035	62,944,904,382
TOTAL	30,372,673,100	33,409,940,410	36,750,934,451	40,426,027,896	44,468,630,686	48,915,493,754	53,807,043,130	288,150,743,427

Estimated capacity of the local government of Ende Regency

3 setting WASH	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Komunitas	20,218,704,000	22,240,574,400	24,464,631,840	26,911,095,024	29,602,204,526	32,562,424,979	35,818,667,477	191,818,302,246
Sarana Kesehatan	451,328,900	496,461,790	546,107,969	600,718,766	660,790,642	726,869,707	799,556,677	4,281,834,452
Sarana Pendidikan	4,694,943,000	5,164,437,300	5,680,881,030	6,248,969,133	6,873,866,046	7,561,252,651	8,317,377,916	44,541,727,076
TOTAL	25,364,975,900	27,901,473,490	30,691,620,839	33,760,782,923	37,136,861,215	40,850,547,337	44,935,602,070	240,641,863,774

Regency WASH Funding GAP Analysis

3 setting WASH	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Komunitas	267,300,000	294,030,000	323,433,000	355,776,300	391,353,930	430,489,323	473,538,255	2,535,920,808
Sarana Kesehatan	2,800,601,100	3,080,661,210	3,388,727,331	3,727,600,064	4,100,360,071	4,510,396,078	4,961,435,685	26,569,781,538
Sarana Pendidikan	1,939,796,100	2,133,775,710	2,347,153,281	2,581,868,609	2,840,055,470	3,124,061,017	3,436,467,119	18,403,177,306
TOTAL	5,007,697,200	5,508,466,920	6,059,313,612	6,665,244,973	7,331,769,471	8,064,946,418	8,871,441,059	47,508,879,653
% Gap Pendanaan								16%

Estimasi anggaran ini diambil dari perhitungan RKA masing-masing OPD Tahun Anggaran 2020-2023 dengan rincian estimasi kenaikan 10% pertahun. Untuk anggaran komunitas diambil dari RKA OPD Dinas PUPR dan Dinas PRKP, sedangkan anggaran Sarana Kesehatan diambil dari RKA Dinas Kesehatan dan anggaran sarana Pendidikan diambil dari RKA dinas Pemuda dan Olahraga. Anggaran ini sudah termasuk biaya monitoring, evaluasi dan pelatihan. Dari Estimasi diatas, target pencapaian OPD bisa mencapai 80% namun disesuaikan dengan ketersediaan PAGU anggaran masing-masing OPD

Dengan estimasi penggunaan anggaran pada 3 setting target sebagaimana dijelaskan diatas maka tentunya pemerintah Kabupaten Ende memiliki keterbatasan anggaran sehingga Bappeda Kabupaten Ende bersama para mitra pembangunan terus mendorong OPD teknis memaksimalkan anggaran air dan sanitasi dalam Renja dan RKP. Selain itu terus mendorong alternatif pendanaan lain dari sektor lembaga keuangan seperti Bank NTT Cabang Ende melalui mikro kredit AMS (Air Minum dan Sanitasi) dengan produk KREDIT MERDEKA. Selain dengan Bank NTT, ada juga lembaga keuangan lain seperti Koperasi Kredit. Sesuai dengan rekomendasi dari Puskpodit Flores Mandiri, Koperasi Kredit Sangosai karena Koperasi Kredit ini memiliki produk Mikro Finance yang bisa diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- 1. Profil Sanitasi Sekolah 2022 Final (minus ISBN)**
- 2. LAPORAN NASIONAL RISKESDAS TAHUN 2013**
- 3. RAD AMPL Kabupaten Ende 2022-2024**
- 4. SSK Kabupaten Ende 2019-2023**
- 5. RISPAM Kabupaten Ende 2023-2037**
- 6. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran OPD TA 2020-2023**
- 7. Renja (Rencana Kerja) OPD TA 2020-2023**
- 8. Rancangan Akhir RPD Kabupaten Ende TA 2024-2026**
- 9. RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2023**

Penutup

Demikian pemaparan road map atau peta jalan pembiayaan air minum dan sanitasi yang dikembangkan untuk 3 setting target sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan adanya sistem pembiayaan air dan sanitasi yang dilengkapi dengan peta jalan atau road map yang sudah disusun dan disepakati bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta pemerintah desa maka akan lebih mempermudah dalam memahami alur dan sistem perencanaan keuangan pemerintah.

Dengan demikian panduan ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan program terutama air minum dan sanitasi. Dengan adanya estimasi pembiayaan air minum dan sanitasi pada 3 setting layanan yakni Komunitas, Layanan Kesehatan dan Layanan Pendidikan yang sudah dibuat oleh Pokja PKP Kabupaten maka akan sangat baik baik OPD atau dinas teknis dalam menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan estimasi diatas.

Poja PKP selaku penanggungjawab perencanaan dan penganggaran air minum dan sanitasi akan terus berupaya agar pencapaian air dan sanitasi pada 3 setting layanan dapat tercapai agar target pencapaian UC sesuai dengan mandat SDGs.

Ende, Oktober 2023